

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT ATAU LEMBAGA
KESWADAYAAN MASYARAKAT SEBELUM DAN SESUDAH
PEMBERHENTIAN DANA PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI
KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :
Muhammad Idris
15812147032

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT ATAU LEMBAGA
KESWADAYAAN MASYARAKAT SEBELUM DAN SESUDAH
PEMBERHENTIAN DANA PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI
KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Idris
15812147032

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 17 November 2017
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui,
Dosen Pembimbing



Indarto Waluyo, S.E., M.Acc., CPA., Ak.
NIP. 196910241999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:




**ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT ATAU LEMBAGA
KESWADAYAAN MASYARAKAT SEBELUM DAN SESUDAH
PEMBERHENTIAN DANA PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI
KABUPATEN BANTUL**

Oleh:

Muhammad Idris
NIM 15812147032

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 06 Desember 2017

TIM PENGUJI

Nama Lengkap	Tanda Tangan	Tanggal
Drs. M. Djazari, M.Pd Ketua Penguji		19 Desember 2017
Indarto Waluyo, S.E., M.Acc., CPA., Ak. Sekretaris		19 Desember 2017
Abdullah Taman, S.E., M.Si., Ak. Penguji Utama		13 Desember 2017

Yogyakarta, 20 Desember 2017

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Idris

NIM : 15812147032

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelola Keuangan Pada Badan
Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat
Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana PNPM Mandiri
Perkotaan di Kabupaten Bantul

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri.
Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau
diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata
penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan yang tidak dipaksakan.

Yogyakarta, Desember 2017
Yang menyatakan,



Muhammad Idris
NIM. 15812147032

MOTTO

“ Wahai anak turun Adam, kalian melonggarkanlah waktumu untuk beribadah kepadaKu (Allah), maka Aku (Allah) akan memenuhi hatimu dengan kekayaan (kebahagian) dan Aku (Allah) akan menutupi kefakiranmu (kekuranganmu),....” (HR. Ibnu Maajah)

“Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.
(Al-Baqarah [2] : 153)

Lakukanlah segala hal sebaik dan semaksimal mungkin disertai dengan ikhlas,
karena tidak ada hal yang sia-sia di dunia ini
(IBU)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SwT., karya ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan dengan doa,
motivasi, nasihat dan teladannya.

Keluarga besar yang menjadi penyemangat dalam menempuh proses perkuliahan
selama ini.

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT ATAU LEMBAGA
KESWADAYAAN MASYARAKAT SEBELUM DAN SESUDAH
PEMBERHENTIAN DANA PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI
KABUPATEN BANTUL**

Oleh:
Muhammad Idris
15812147032

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Kinerja Keuangan UPK sebelum dan sesudah diberhentikannya dana PNPM Mandiri Perkotaan terhadap pinjaman bergulir. Kinerja Keuangan UPK diproksikan menggunakan *Loan at Risk* (LAR), *Portofolio at Risk* (PAR), *Return on Investment* (ROI) dan *Cost Coverage Ratio* (CCr).

Jenis penelitian ini adalah analisis komparatif. Populasi penelitian adalah seluruh UPK pada BKM/LKM di Kabupaten Bantul yang berjumlah 50 BKM/LKM dengan sampel berjumlah 35 BKM/LKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji normalitas dan uji hipotesis menggunakan program SPSS versi 20.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat perbedaan pada *Loans at Risk* (LAR) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan. (2) Tidak terdapat perbedaan pada *Portfolio at Risk* (PAR) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan. (3) Terdapat perbedaan pada *Return on Investment* (ROI) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan. (4) Tidak terdapat perbedaan pada *Cost Coverage* (CCr) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan.

Kata kunci: PNPM Mandiri Perkotaan, Kinerja Keuangan, Unit Pengelola Keuangan, *Loans at Risk*, *Portfolio at Risk*, *Return on Investment*, *Cost Coverage*

**FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF FINANCIAL
MANAGEMENT UNIT IN THE SOCIAL EMPOWERMENT AGENCY OR
INSTITUTIONAL EMPOWERMENT AGENCY BEFORE AND AFTER
THE TERMINATION OF PNPM MANDIRI FUNDAMENTAL URBAN IN
BANTUL REGENCY**

By:
Muhamad Idris
15812147032

ABSTRACT

This study aims to determine the differences in UPK Financial Performance before and after the dismissal of PNPM Mandiri Urban funds to revolving loans. UPK's Financial Performance is proxied using Loan at Risk (LAR), Portfolio at Risk (PAR), Return on Investment (ROI) and Cost Coverage Ratio (CCr).

The type of research is comparative analysis. The population of research is all UPK in BKM / LKM in Bantul Regency which is amounted to 50 BKM / LKM with the amount of the sample is 35 BKM / LKM. The sampling technique is using purposive sampling technique. The technique of data collection is using documentation. The data analysis technique which is used in this research is descriptive statistical analysis, normality test and hypothesis test using SPSS version 20 program.

The results of the research have shown that: (1) There is no difference in the Loans at Risk (LAR) in both of before and after the termination of funding assistance in PNPM Mandiri Urban. (2) There is no difference in the Portfolio at Risk (PAR) either before or after termination of funding assistance in PNPM Mandiri Urban. (3) There is a difference in Return on Investment (ROI) in both of before and after termination of funding assistance in PNPM Mandiri Urban. (4) There is no difference in Cost Coverage (CCr) either before or after termination of funding assistance in PNPM Mandiri Urban.

Keywords: PNPM Mandiri Urban, Financial Performance, Financial Management Unit, Loans at Risk, Portfolio at Risk, Return on Investment, Cost Coverage

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelola Keuangan pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Indarto Waluyo, S.E., M.Acc., CPA., Ak., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan bantuan dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini.
2. Bapak Abdullah Taman, S.E., M.Acc., CPA., Ak., Penguji utama yang terus memberikan bimbingan, arahan-arahan, dan pengujian dalam tugas akhir skripsi ini.
3. Ibu Rr. Indah Mustikawati, M.Si., Ak., CA., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Denies Priantinah, S.E., M.Si., Ak., CA., Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Ibu Dyah Setyorini, S.E., M.Si., Ak., Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Segenap dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, baik teori maupun praktik.
8. Seluruh staf pengelola dan administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri.
9. Bapak Sudarmana, S.E., AK., CA., koordinator perwakilan Yogyakarta di KAP Budiman Wawan Pamudji dan Rekan yang telah memberikan masukan pada tugas akhir ini.
10. Whisnu Primadiarta, S.E., Akt., Asisten Kota KOTAKU di Yogyakarta yang telah membantu pada tugas akhir ini.
11. Teman-teman PKS Akuntansi UNY angkatan 2015.
12. Seluruh pihak yang turut membantu dan memberikan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi perbaikan dan pengembangan tugas akhir ini. Peneliti berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembacanya. Amin.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Yogyakarta, Desember 2017



Muhammad Idris

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 10
A. Landasan Teori.....	10
1. Kinerja Keuangan	10
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan	17
3. Badan Keswadayaan Masyarakat	22
4. Unit Pengelola Keuangan (UPK)	25
B. Penelitian yang Relevan	26
C. Kerangka Berpikir	31
D. Paradigma Penelitian.....	32
E. Hipotesis Penelitian.....	33
 BAB III METODE PENELITIAN	 34
A. Desain Penelitian.....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel	35
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
1. Statistik Deskriptif	37
2. Uji Normalitas	38
3. Uji <i>Paired Sample T-Test</i>	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Seleksi Data.....	40
2. Statistik Deskriptif	43
3. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Keterbatasan.....	62
C. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel	hal
1. Pelanggaran Kualifikasi Sampel	41
2. Daftar NKM/LKM Sampel Penelitian	42
3. Statistik Deskriptif	43
4. Hasil Pengujian Normalitas Data.....	48
5. Hasil Uji Hipotesis	48
6. Ringkasan Kesimpulan Uji Hipotesis	49
7. Hasil Uji Rasio Kinerja Keuangan UPK.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	hal
1. Kolektibilitas Pinjaman Bergulir Tahun 2014-2015 (KSM melakukan pinjaman dalam persentase).....	52
2. Kolektibilitas Pinjaman Bergulir Tahun 2014-2015 (Dana yang telah dipinjamkan UPK dalam persentase)	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	hal
1. Daftar BKM/LKM di Kabupaten Bantul	69
2. Daftar LAR pada BKM/LKM di Kabupaten Bantul.....	70
3. Daftar PAR pada BKM/LKM di Kabupaten Bantul.....	71
4. Daftar ROI pada BKM/LKM di Kabupaten Bantul.....	72
5. Daftar CCr pada BKM/LKM di Kabupaten Bantul.....	73
6. Data Statistik Program SPSS 20.0	74
7. Surat Observasi Penelitian.....	76
8. Surat Ijin Penelitian.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Program PNPM Mandiri Perkotaan dalam melaksanakan programnya tidak langsung ke masyarakat, tetapi dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ataupun Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). BKM ataupun LKM adalah sebuah wadah yang dibentuk untuk membangun kembali ikatan sosial dan solidaritas sosial sesama warga masyarakat agar mampu mengatasi kemiskinan secara mandiri dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.

BKM/LKM dalam melaksanakan programnya dibantu oleh tiga unit, yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Unit yang telah dibuat oleh BKM/LKM memiliki tugasnya masing-masing, UPK memiliki tugas utama yaitu menyalurkan bantuan dana melalui program pinjaman bergulir yang akan dipinjamkan kepada masyarakat yang berguna sebagai stimulus agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya atau membuat usaha baru dengan menggunakan dana pinjaman tersebut, UPL memiliki tugas utama yaitu menyalurkan bantuan dana pemerintah yang fokus utamanya yang bersifat lingkungan seperti pengecoran jalan, UPS memiliki tugas utama yaitu menyalurkan bantuan dana pemerintah yang fokus utamanya bersifat

sosial seperti mengadakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat sekitar. Dari tiga unit tersebut hanya UPK yang dapat menghasilkan laba, laba yang diperoleh UPK akan didistribusikan ke unit-unit yang lain.

UPK memiliki peran yang sangat penting bagi BKM/LKM, sehingga UPK diharapkan keberlangsungannya. Keberlangsungan dari UPK mengelola pinjaman bergulir adalah dengan menjaga baik Kinerja Keuangan UPK. Menurut Bastian (2001: 329) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Dari pendapat tersebut dapat diketahui, bahwa untuk menjaga keberlangsungan bagi UPK, maka harus menjaga Kinerja Keuangan UPK. Sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir (2014: 36) disebutkan bahwa kinerja UPK meliputi Kinerja Pegawai UPK, Kegiatan Operasional UPK, Kinerja Keuangan UPK dan Pembukuan UPK.

Menurut Sawir (2005: 1) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan UPK dapat dilihat dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan yang digunakan oleh UPK untuk mengetahui Kinerja Keuangan UPK telah ditentukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum pada buku Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir (2014: 37-38) meliputi pinjaman yang tertunggak

(*Portfolio at Risk/*PAR), peminjam yang menunggak (*Loans at Risk/*LAR), Pencapaian Laba (*Return on Investment /*ROI) dan Efisiensi biaya (*Cost Coverage/* CCr).

Kinerja Keuangan UPK digunakan oleh UPK untuk mengetahui beberapa kelemahan yang menjadi kekurangan UPK, untuk memprediksi potensi yang mungkin akan dilakukan oleh UPK dimasa yang akan datang dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan oleh pengurus UPK seperti ketika LAR dan PAR sangat tinggi maka yang harus dilakukan oleh UPK adalah dengan mengintensifkan penagihan tunggakan, jika ROI terlalu rendah maka pengurus UPK dapat melakukan (1) mengintensifkan tunggakan pinjaman; (2) mengevaluasi apakah jasa pinjaman terlalu rendah dan (3) mengevaluasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan UPK terlalu tinggi dan jika CCr terlalu rendah maka menandakan UPK belum bisa mandiri, maka UPK perlu mengevaluasi dalam mengelola pinjaman bergulir. Oleh karena itu, Kinerja Keuangan UPK sangatlah penting bagi UPK, karena dengan adanya Kinerja Keuangan UPK maka UPK dapat mengantisipasi resiko maupun potensi apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Penelitian ini terfokus pada UPK yang dikelola oleh BKM/LKM yang ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran program PNPM Mandiri Perkotaan. Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Luas wilayah Kabupaten Bantul

adalah 50.685 Ha yang terbagi menjadi 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan dan Sedayu. Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul telah membangun 50 BKM/LKM. BKM/LKM yang ada di Bantul dalam melaksanakan program PNPM Mandiri Perkotaan ada yang dapat dikatakan sukses dan ada yang kurang sukses dalam melaksanakannya. Sorotan sukses tidaknya program tersebut adalah pada pelaksanaan unit UPK yang melaksanakan program pinjaman bergulir.

Sesuai dengan observasi yang telah dilakukan peneliti total dana pinjaman bergulir yang telah dipinjamkan kepada masyarakat Bantul sampai tahun 2013 mencapai Rp13.631.663.405,00. Dana yang dipinjamkan kepada masyarakat sebesar 75% atau Rp9.768.755.785,00 masuk dalam kategori pinjaman lancar, 14% atau Rp1.872.536.652,00 masuk dalam kategori dalam perhatian khusus, 4% atau Rp514.899.904,00 masuk dalam kategori pinjaman kurang lancar, 2% atau Rp307.054.750,00 masuk dalam kategori pinjaman diragukan, dan 9% atau Rp1.168.416.314,00 masuk dalam kategori macet. Pada tahun 2014 total dana pinjaman bergulir Rp16.055.276.518,00. Dana yang dipinjamkan masyarakat sebesar 66% atau Rp10.645.895.086 masuk dalam kategori pinjaman lancar, 18% atau Rp2.913.708.486,00 masuk dalam kategori dalam perhatian khusus, 5% atau Rp739.044.015,00 masuk dalam kategori pinjaman kurang lancar, 2% atau Rp296.960.824,00 masuk dalam kategori

pinjaman diragukan, dan 9% atau Rp1.459.668.107,00 masuk dalam kategori macet. Sesuai data tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pinjaman bergulir pada tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dikatakan baik, karena sebanyak 75% dan 66% masuk dalam kategori pinjaman lancar, tetapi dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan persentase yaitu dari 75% menjadi 66%. Pada kategori pinjaman dalam perhatian khusus dan pinjaman kurang lancar mengalami kenaikan sebesar 4% dan 1%.

Program pinjaman bergulir yang dikelola oleh UPK pada tahun 2013 dan 2014 dianggap masih berjalan dengan baik dikarenakan masih menerima bantuan dari pemerintah tetapi dengan adanya surat Nomor 100/1694/SJ dan Nomor 01/BA/M-DPDTT/IV/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2014 menandakan dana bantuan program PNPM Mandiri Perkotaan dihentikan. Tahun 2015 dana program PNPM Mandiri Perkotaan dihentikan tetapi untuk BKM/LKM masih tetap beroperasi seperti biasa. Pada tahun 2015 BKM/LKM beroperasi menggunakan dana masing-masing yang telah dikelola sendiri sejak lama, oleh karena itu dapat diketahui BKM/LKM mana saja yang masih beroperasi dan yang sudah tidak beroperasi dikarenakan sudah tidak mempunyai dana untuk dikelola.

Penelitian ini terfokus pada Kinerja Keuangan UPK pada BKM/LKM yang ada di Kabupaten Bantul mengenai Kinerja Keuangan UPK dalam pengelolaan pinjaman bergulir sebelum dan sesudah dihentikannya program PNPM Mandiri Perkotaan. Penilaian Kinerja Keuangan UPK telah diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam Buku Petunjuk Teknis Pinjaman

Bergulir. Kinerja Keuangan UPK yang meliputi pinjaman yang tertunggak (*Portfolio at Risk / PAR*), peminjam yang menunggak (*Loans at Risk / LAR*), Pencapaian Laba (*Return on Investment / ROI*) dan Efisiensi biaya (*Cost Coverage / CCr*). Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelola Keuangan pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Program PNPM Mandiri Perkotaan telah berakhir dan pada dasarnya program tersebut harus tetap berlanjut seperti yang diharapkan oleh pemerintah.
2. Ada beberapa BKM/LKM tidak dapat beroperasi ketika dana bantuan dari pemerintah berhenti.
3. Ada beberapa UPK yang tidak dapat beroperasi karena dana pinjaman bergulir telah habis.
4. Selesainya program PNPM Mandiri Perkotaan mengakibatkan dana bantuan dari pemerintah juga berhenti, sehingga mempengaruhi Kinerja Keuangan UPK.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membuat pembatasan yang mempersempit penelitian sehingga lebih terfokus. Penelitian ini hanya dilakukan pada UPK yang dikelola oleh BKM/LKM di Kabupaten Bantul dan terfokus pada selesainya program PNPM Mandiri Perkotaan yang mengakibatkan dana bantuan dari pemerintah juga berhenti, sehingga mempengaruhi Kinerja Keuangan UPK. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu laporan keuangan yang dikelola oleh UPK setelah diaudit. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada UPK sesuai dengan petunjuk teknis pinjaman bergulir yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yaitu dengan melihat rasio *Portfolio at Risk* (PAR), *Loans at Risk* (LAR), *Return on Investment* (ROI) dan *Cost Coverage* (CCr).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan *Loans at Risk* (LAR) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015?
2. Apakah terdapat perbedaan *Portfolio at Risk* (PAR) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015?

3. Apakah terdapat perbedaan *Return on Investment* (ROI) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015?
4. Apakah terdapat perbedaan *Cost Coverage* (CCr) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perbedaan *Loans at Risk* (LAR) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.
2. Perbedaan *Portfolio at Risk* (PAR) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.
3. Perbedaan *Return on Investment* (ROI) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.
4. Perbedaan *Cost Coverage* (CCr) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dirincikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian lain. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman lebih mendalam tentang pelaksanaan program-program Pemerintah selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintah selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Informasi akuntansi merupakan salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola suatu organisasi ataupun perusahaan. Menggunakan informasi akuntansi juga dapat mengetahui sampai mana pencapaian tujuan dan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas organisasi ataupun perusahaan yang telah dilaksanakan dalam periode waktu tertentu.

Menurut Bastian (2001: 329) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh suatu organisasi ataupun perusahaan dalam periode tertentu.

Pengukuran kinerja dapat diketahui dengan menggunakan informasi dari keuangan maupun *non* keuangan. Pada penelitian ini informasi yang digunakan adalah informasi berdasarkan keuangan.

Menurut Mulyadi (2007: 2) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya”. Sedangkan menurut Sawir (2005: 1) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan. Sementara itu menurut IAI (2007), dikemukakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Sucipto (2003: 34), pengertian kinerja keuangan yakni penentuan ukuran - ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan apa yang dinyatakan di atas, kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan organisasi atau perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan oleh organisasi ataupun perusahaan, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Suatu organisasi ataupun perusahaan dapat dikatakan berhasil ketika telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi ataupun perusahaan tersebut.

b. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pada suatu organisasi ataupun perusahaan, untuk mengetahui kinerja suatu manajemen harus dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap suatu organisasi ataupun perusahaan yang belum menyampaik tujuannya atau mengembangkannya menjadi lebih baik. Pengukuran kinerja (Anggraini dan Puranto, 2010: 180), adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat atau menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Mulyadi (2001: 353), Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka pengukuran kinerja sesungguhnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Pendapat lain menurut Anthony, Banker, Kaplan dan Young, dan dalam Sony Yuwono, dkk, (2006: 21-23) mendefinisikan Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai *“The activity of measuring the performance of an activity or the entire value chain”*. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan sebagai umpan balik

yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu strategi yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu pengukuran kinerja yang merupakan alat bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerjanya.

Pengukuran kinerja keuangan setiap organisasi ataupun perusahaan berbeda-beda tergantung pada lingkup yang dijalankannya. Organisasi ataupun perusahaan yang memiliki sektor usaha yang berbeda juga memiliki pengukuran kinerja keuangan yang berbeda-beda antar sektor bisnis. Begitu juga pada sektor lembaga atau badan yang menjalankan usahanya yaitu menyalurkan dana bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan dan khususnya UPK dalam mengelola pinjaman bergulir.

Pengukuran kinerja keuangan pada pinjaman bergulir yang telah dikelola oleh UPK sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, ada empat indikator, yaitu :

1) *Loans at Risk* (LAR)

LAR adalah indikator yang menunjukkan berapa persen peminjam yang menunggak dalam pengembalian pinjaman yang lebih dari 3 bulan (Kementrian Pekerjaan Umum, 2014: 37). Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara berapa KSM peminjam yang menunggak > 3 bulan dengan seluruh KSM peminjam yang masih memiliki saldo pinjaman. Semakin tinggi hasil persentasinya, menandakan semakin tinggi peminjam yang menunggak dalam melakukan pembayaran, jika LAR semakin tinggi maka UPK harus mengintensifkan penagihan tunggakan. Semakin banyak peminjam yang menunggak maka akan berpengaruh terhadap pendapatan pada UPK dan juga uang tersebut tidak dapat digulirkan ke peminjam yang lain.

Rumus LAR :

$$\text{LAR} = \frac{\text{Jumlah KSM menunggak} \geq 3 \text{ bulan}}{\text{Jumlah KSM peminjam}} \times 100\%$$

Informasi terkait jumlah KSM menunggak ≥ 3 bulan dan jumlah KSM peminjam dapat diperoleh dari daftar kolektibilitas yang dimiliki masing-masing UPK dan berisi tentang daftar KSM yang memiliki pinjaman bergulir.

2) *Portfolio at Risk* (PAR)

PAR adalah indikator yang menunjukkan berapa persen pinjaman yang tertunggak lebih dari 3 bulan (Kementrian

Pekerjaan Umum, 2014: 37). Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara jumlah pinjaman yang tertunggak > 3 bulan dengan total realisasi saldo pinjaman di UPK. Semakin tinggi persentasinya, menandakan semakin tinggi pinjaman yang dipinjam oleh KSM menunggak, jika LAR semakin tinggi maka UPK harus mengintensifkan penagihan tunggakan. Perbedaan Rasio PAR dengan LAR adalah, pada Rasio PAR perhitungan meliputi dana pinjaman yang dipinjam oleh KSM, tetapi pada rasio LAR perhitungan mengenai total peminjam yaitu KSM.

Rumus PAR :

$$PAR = \frac{\text{Pinjaman tertunggak} \geq 3 \text{ bulan}}{\text{Realisasi saldo pinjaman}} \times 100\%$$

Informasi terkait pinjaman tertunggak ≥ 3 bulan dan realisasi saldo pinjaman dapat diperoleh dari daftar kolektibilitas yang dimiliki masing-masing UPK dan berisi tentang daftar KSM yang memiliki pinjaman bergulir.

3) *Return on Investment* (ROI)

ROI adalah kemampuan UPK untuk menghasilkan laba dari modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir (Kementrian Pekerjaan Umum, 2014: 37). Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara laba yang diperoleh UPK dengan modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir. Pada rasio ini, semakin besar persentase ROI maka akan semakin baik,

begitupun sebaliknya semakin kecil persentasenya maka kurang begitu baik. Semakin besar persentasi menandakan UPK dapat menghasilkan laba yang besar, laba yang semakin besar sangatlah baik karena dari laba tersebut dapat menggerakkan unit-unit lainnya, jika ROI terlalu rendah maka UPK harus (1) mengintensifkan penagihan tunggakan; (2) mengevaluasi apakah jasa pinjaman terlalu rendah; (3) mengevaluasi apakah biaya operasional UPK terlalu tinggi. Apabila kondisi UPK pada persentase rasio secara terus menerus kecil, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tidak akan ada keberlanjutan dan berkembang karena tidak akan terjadi penambahan modal pada UPK.

Rumus ROI :

$$ROI = \frac{Laba\ bersih}{Modal\ Investasi} \times 100\%$$

Informasi terkait laba bersih dapat diperoleh dari laporan keuangan setelah audit pada laba rugi tahunan yang dikelola oleh UPK, kemudian modal investasi dapat diperoleh dari laporan keuangan setelah audit pada neraca khususnya semua ekuitas selain laba rugi tahun berjalan.

4) *Cost Coverage (CCr)*

CCr adalah kemampuan UPK untuk menutup biaya dari pendapatan yang diperoleh (Kementrian Pekerjaan Umum,

2014: 38). Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara seluruh pendapatan yang diperoleh UPK dengan seluruh biaya yang dikeluarkan UPK. Pada rasio ini, semakin besar persentase rasio maka dianggap semakin baik, begitupun sebaliknya semakin kecil persentase rasionya maka akan kurang baik. Semakin besar persentase rasio CCr menandakan bahwa UPK telah mandiri dan pendapatan UPK cukup untuk memenuhi biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Rumus CCr :

$$CCr = \frac{\text{Total pendapatan tunai UPK}}{\text{Total biaya tunai UPK}} \times 100\%$$

Informasi terkait total pendapatan tunai UPK dan total biaya tunai UPK dapat diperoleh dari laporan keuangan setelah audit pada laba rugi tahunan yang dikelola oleh UPK.

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Perkotaan

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Sebelum PNPM Mandiri Perkotaan banyak program pemerintah yang telah dilaksanakan, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada satu sisi bantuan tersebut memang dapat efektif mencapai sasaran, tetapi pada sisi lain menimbulkan ketergantungan dan mematikan kreasi masyarakat. Persoalan lain

ditemui adalah sasaran pada masyarakat miskin, banyak kontroversi berkaitan kelompok sasaran tersebut. Sesuai dengan ketentuan bahwa proyek kemiskinan harus diberikan kepada masyarakat miskin tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan awal karena kurang adanya dukungan dari komponen masyarakat, sehingga pada tahun 1999 ada program pemerintah yang bernama Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), program tersebut berupaya untuk membangun kemandirian bermasyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan P2KP berbeda dengan program-program terdahulu, pada P2KP masyarakat diberi fasilitas dan dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola dana tersebut secara partisipatif, transparan dan akuntabel. P2KP sendiri dianggap sukses, karena pelaksanaan program P2KP mencapai tiga tahap yaitu P2KP-1, P2KP-2 dan P2KP-3. Pelaksanaan program P2KP saat itu telah mencakup sekitar 6.405 BKM/LKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 243.838 KSM. Pelaksanaan program tersebut dirasakan cukup membantu mengentaskan kemiskinan sehingga pada tahun 2008 berubah menjadi PNPM Mandiri Perkotaan, dengan mengalokasikan tambahan dana yang cukup signifikan pada tahun anggaran 2008 yang

mencakup 8.813 kelurahan di 995 kecamatan tersebar pada 245 kota/kabupaten.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11.000 BKM/LKM yang tersebar di sekitar 1.153 kecamatan di 268 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 860 ribuan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan akan membantu masyarakat miskin tanpa mematikan kreasi masyarakat dan juga dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat dikembangkan lagi oleh masyarakat. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan disebutkan (2014: 11-13) bahwa:

a. Tujuan

Tujuan umum PNPM Mandiri Perkotaan telah ditetapkan di Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan yaitu "Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri".

Secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan yaitu "Membantu masyarakat miskin perkotaan di kelurahan/ desa peserta program mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan dan tata pemerintahan yang baik."

b. Prinsip

- a) Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- b) Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- c) Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- d) Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- e) Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- f) Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.

- g) Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- h) Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- i) Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- j) Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- k) Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

- l) Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola oleh masyarakat.

c. Dasar Hukum

Dasar hukum PNPM Mandiri Perkotaan adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

3. Badan Keswadayaan Masyarakat

BKM/LKM merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota-anggotanya dari masyarakat sekitar dan dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat. Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat menghasilkan keputusan secara bersama-sama karena dalam BKM/LKM dalam pengambilan keputusan tidak ada yang *absolute* dari salah satu pihak tetapi keputusan didapat dari musyawarah bersama-sama bersama anggotanya. BKM/LKM sebagai dewan pimpinan kolektif adalah milik seluruh penduduk kelurahan yang bersangkutan.

Pada dasarnya BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif suatu masyarakat warga penduduk kelurahan/desa dengan fungsi utama mengendalikan atau mengemudikan kegiatan penanggulangan kemiskinan

di kelurahan tersebut. BKM/LKM beranggotakan oleh masyarakat sekitar sehingga mengetahui karakteristik masyarakatnya, kondisi perekonomian masyarakat sekitar, kondisi sosial masyarakat sekitar, oleh karena itu BKM/LKM diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya. Oleh sebab itu peran utama BKM/LKM sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2014: 81) adalah :

- a. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (Program Jangka Menengah Program penanggulangan kemiskinan) dan diajukan ke Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) untuk mencairkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- b. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya di tingkat komunitas;
- c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yg dilaksanakan;
- d. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan;

- e. Mengembangkan jaringan BKM/LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;
- f. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana BLM, yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

BKM/LKM memiliki tiga unit dalam melaksanakan program PNPM Mandiri Perkotaan. Tiga unit tersebut beserta tugasnya adalah :

- a. Unit Pengelola Keuangan (UPK)
 - 1) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM Ekonomi,
 - 2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi,
 - 3) Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM mengadministrasikan keuangan,
 - 4) Menjalin kemitraan (*channelling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK.
- b. Unit Pengelola Sosial (UPS)
 - 1) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau panitia pembangunan,
 - 2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh KSM atau panitia Pembangunan

- 3) Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan dan pemukiman yang lestari, sehat dan terpadu,
- 4) Menggali potensi lokal yang ada di wilayah,
- 5) Menjalin kemitraan (*channelling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program UPL.

c. Unit Pengelola Lingkungan (UPL).

- 1) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM atau panitia,
- 2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM atau panitia bidang sosial,
- 3) Membangun atau mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga,
- 4) Memfasilitasi dan mendorong masyarakat atau relawan dalam Komunikasi Belajar Desa (KBD),
- 5) Mendorong Kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, sunatan massal, dan lain-lain,
- 6) Menjalin kemitraan (*channelling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program sosial UPS.

4. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

UPK merupakan salah satu unit yang telah dibuat oleh BKM/LKM untuk melaksanakan program PNPM Mandiri Perkotaan. Tugas utama UPK adalah membantu BKM/LKM dalam menyalurkan

dana bantuan, dana bantuan ini berupa dana pinjaman bergulir yang diberikan kepada masyarakat untuk modal usaha produktif baik usaha baru maupun usaha berkembang. Dana pinjaman bergulir merupakan dana pendorong bagi masyarakat agar partisipatif dalam mengelola dana abadi yang diberikan pemerintah. Dana pinjaman bergulir yang diberikan kepada masyarakat melalui KSM. Selain untuk menambah modal bagi masyarakat dalam usahanya, pinjaman bergulir juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UPK.

Pada tiga unit yang dibuat oleh BKM/LKM untuk membantu dalam melaksanakan program PNPM Mandiri Perkotaan, yang paling diharapkan keberlanjutannya adalah UPK, karena hanya UPK yang dalam aktivitasnya dapat menghasilkan laba bagi BKM/LKM. Laba yang dihasilkan dari UPK sebagian akan dimasukkan pada pemupukan modal untuk UPK dan sebagian akan dikelola oleh BKM/LKM untuk dikelola dan dibagikan kepada UPL ataupun UPS. Keberlanjutan BKM/LKM mungkin dapat dikatakan ada pada operasi UPK dalam menyalurkan pinjaman bergulir, sehingga Kinerja Keuangan UPK dalam mengelola pinjaman bergulir harus dijaga dengan baik.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Slamet dan Sarsiti (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat, Pinjaman Bergulir, Pelatihan Dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha

Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Melalui Program PNPM-Mandiri Perkotaan Di Desa Tunggorono Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo” (Jurnal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan langsung masyarakat, pinjaman bergulir, pelatihan dan pendampingan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha anggota ksm melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tunggorono.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang dana PNPM Mandiri Perkotaan. perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini berfokus pada penyaluran dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan dan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Kinerja Keuangan UPK sebelum dan sesudah dana bantuan dihentikan.

2. Penelitian yang dilakukan Efri Novianto (2012) yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara” (Skripsi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor 2 tahun 2007 tidak efektif dalam menanggulangi kemiskinan yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) tidak tercapai.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang keputusan peraturan pemerintah. perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini berfokus pada peraturan daerah yang diimplementasikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada surat keputusan dari Kementrian Dalam Negeri tentang pemberhentian dana bantuan untuk program PNPM Mandiri Perkotaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arum Danarti Purnomo dan Sukdjo (2015) yang berjudul “Analisis Kinerja Unit Pengelola Keuangan Dan Unit Pengelola Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada BKM Ngudi Makmur Desa Semanu Kabupaten Gunung Kidul” (Jurnal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kegiatan pinjaman bergulir tidak tepat sasaran karena sebagian besar penerima manfaatnya bukan berasal dari masyarakat miskin sebagaimana yang terdapat dalam petunjuk buku teknis pnpm mandiri perkotaan dan petunjuk teknis pinjaman bergulir. Penerima manfaat dari pelatihan kewirausahaan tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis PNPM Mandiri Perkotaan dan petunjuk teknis kegiatan tridaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang UPK. perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini berfokus pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan yang akan

dilakukan oleh UPK dan UPS dan pada penelitian ini akan berfokus pada Kinerja Keuangan UPK sebelum dan sesudah dana bantuan dihentikan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Dewi Oktaviani (2015) yang berjudul “Analisi Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Melakukan Merger Dan Akuisisi Pada Tahun 2000-2010” (Skripsi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio CAR (*capital adequacy ratio*) tidak mengalami perbedaan, disebabkan karena adanya kontrol pemerintah. Rasio PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) mengalami perbedaan, hal ini membuktikan bahwa setelah melakukan merger kemampuan manajemen dalam menjaga kualitas aktiva produktif secara umum makin meningkat. Rasio NIM (*net interest margin*) mengalami perbedaan hal ini disebabkan karena evaluasi manajemen bank dalam mengelola berbagai resiko yang mungkin terjadi pada suku bunga mengalami perbaikan. Rasio ROA (*return on asset*) mengalami perbedaan, hal ini karena kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset menghasilkan keuntungan yang terus meningkat. Rasio LDR (*loan to deposit ratio*) tidak mengalami perbedaan, hal ini dikarenakan bank tidak menggunakan seluruh dana yang dimilikinya untuk meningkatkan kredit.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama merupakan penelitian analisis komparatif. Pada penelitian ini membandingkan kinerja keuangan perbankan sebelum dan sesudah merger dan pada penelitian yang akan dilakukan

membandingkan Kinerja Keuangan UPK sebelum dan sesudah dana bantuan program PNPM Mandiri Perkotaan dihentikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini berfokus pada tingkat kinerja perbankan dan pada penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada Kinerja Keuangan UPK sebelum dan sesudah dana bantuan dihentikan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Septiani (2014) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Setelah Diterapkannya PP 06/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” (Skripsi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk kemandirian fiskal sebelum dan sesudah diterapkannya PP 06/2008. tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah diterapkannya PP 06/2008. terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk efisiensi sebelum dan sesudah diterapkannya PP 06/2008. terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk keserasian belanja publik sebelum dan sesudah diterapkannya PP 06/2008. tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk Pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah diterapkannya PP 06/2008.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang peraturan pemerintah dan juga

merupakan penelitian analisis komparatif. Pada penelitian ini membandingkan pada kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah diterapkannya PP 06/2008 dan pada penelitian yang akan dilakukan peraturan dari surat keputusan dari Kementrian Dalam Negeri tentang pemberhentian dana bantuan untuk program PNPM Mandiri Perkotaan.

C. Kerangka Berpikir

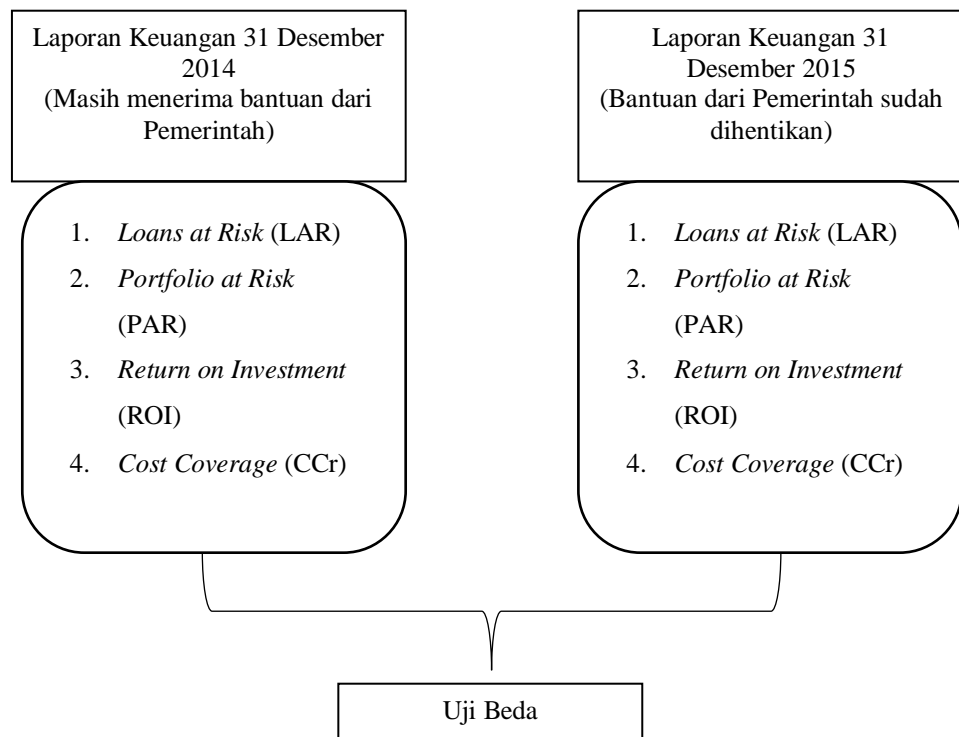
Program PNPM Mandiri Perkotaan adalah salah satu program dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan adalah dengan memberikan dana dari pemerintah dan dana tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat sendiri untuk memajukan dan mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Pengelolaan dana bantuan tersebut dibantu oleh BKM/LKM. Sesuai dengan prinsip PNPM Mandiri Perkotaan adalah salah satunya keberlanjutan, yaitu pemerintah berharap dengan adanya program PNPM Mandiri Perkotaan, program tersebut akan terus berlanjut untuk mengentaskan kemiskinan sampai masa depan.

Pada tanggal 31 Desember 2014, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berita acara serah terima Nomor: 100/1694/SJ dan Nomor: 01/BA/M-DPDTT/IV/2014, maka dana bantuan untuk program PNPM Mandiri Perkotaan telah dihentikan sehingga BKM/LKM pada tahun 2015 melaksanakan program PNPM Mandiri Perkotaan tanpa ada bantuan dana dari pemerintah. Pada tahun 2015 UPK dalam melaksanakan programnya menggunakan dana bantuan yang telah dikembangkan oleh masing-masing

UPK yang diberikan pada periode sebelumnya. UPK yang tidak dapat mengelola dana bantuan pada periode sebelumnya maka akan mengalami kesulitan ketika dana bantuan tersebut dihentikan.

Penelitian ini akan menganalisis tentang Kinerja Keuangan UPK pada BKM/LKM yang ada di Kabupaten Bantul. Kinerja Keuangan UPK sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Kinerja Keuangan UPK meliputi 4 indikator, yaitu LAR (peminjam yang menunggak), PAR (pinjaman yang tertunggak), ROI (pencapaian laba) dan CCr (efisiensi biaya).

D. Paradigma Penelitian



E. Hipotesis Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan bahwa LAR, PAR, ROI dan CCr mengalami perbedaan pada saat sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana program PNPM Mandiri Perkotaan. Sehingga susunan empat hipotesis alternatifnya adalah sebagai berikut :

H1 : Terdapat perbedaan *Loans at Risk* (LAR) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.

H2 : Terdapat perbedaan *Portfolio at Risk* (PAR) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.

H3 : Terdapat perbedaan *Return on Investment* (ROI) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.

H4 : Terdapat perbedaan *Cost Coverage* (CCr) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis komparatif, analisis komparatif menurut Hasan (2008: 116) adalah bentuk analisis variabel (data) untuk mengetahui perbedaan di antara dua kelompok data (variabel) atau lebih. Penelitian ini melakukan komparasi pada Kinerja Keuangan UPK sebelum dan sesudah dihentikannya dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan. Komparasi ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan pada Kinerja Keuangan UPK sebelum dan sesudah dihentikannya dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan kata lain, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan Kinerja Keuangan UPK sebelum dan sesudah dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan dihentikan. Berdasarkan data yang digunakan, penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan mengacu pada perhitungan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data sekunder yaitu dari laporan keuangan UPK pada BKM/LKM di wilayah Kabupaten Bantul. Laporan keuangan diperoleh dari UPK pada BKM/LKM yang ada di Kabupaten Bantul. Waktu penelitian dilakukan pada 1 September-30 November 2017.

C. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2015: 117) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Sementara itu, sampel menurut Arikunto (2013: 176) adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dengan demikian, populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diteliti sementara sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah BKM/LKM di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun 2014 sampai dengan 2015 yang berjumlah 50 BKM/LKM. Sampel diambil dengan metode *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2015: 124) *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan tersebut sesuai kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

Kriteria dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut :

1. BKM/LKM yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
2. UPK telah mengumumkan laba per 31 Desember 2014 dan 2015 pada laporan keuangan setelah audit.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. *Loans at Risk* (LAR)

LAR adalah indikator yang menunjukkan berapa persen peminjam yang menunggak dalam pengembalian pinjaman yang lebih dari 3 bulan.

Rumus LAR :

$$\text{LAR} = \frac{\text{Jumlah KSM menunggak} \geq 3 \text{ bulan}}{\text{Jumlah KSM peminjam}} \times 100\%$$

2. *Portfolio at Risk* (PAR)

PAR adalah indikator yang menunjukkan berapa persen pinjaman yang tertunggak lebih dari 3 bulan.

Rumus PAR :

$$\text{PAR} = \frac{\text{Pinjaman tertunggak} \geq 3 \text{ bulan}}{\text{Realisasi saldo pinjaman}} \times 100\%$$

3. *Return on Investment* (ROI)

ROI adalah kemampuan UPK untuk menghasilkan laba dari modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir.

Rumus ROI :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Modal Investasi}} \times 100\%$$

4. *Cost Coverage* (CCr)

CCr adalah kemampuan UPK untuk menutup biaya dari pendapatan yang diperoleh.

Rumus CCr :

$$\text{CCr} = \frac{\text{Total pendapatan tunai UPK}}{\text{Total biaya tunai UPK}} \times 100\%$$

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik ini merupakan pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan dan menganalisis data yang ada pada dokumen-dokumen berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan BKM/LKM pada saat sebelum dan sesudah dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan dihentikan. Laporan keuangan yang digunakan sebagai data diambil dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian akan dilakukan dengan cara menghitung beberapa rasio yang dianggap dapat menilai Kinerja Keuangan UPK. Rasio inilah yang dijadikan sebagai alat ukur Kinerja Keuangan UPK. Selanjutnya, hasil perhitungan rasio akan digunakan untuk melakukan uji banding antara dua periode yang telah ditetapkan. Adapun jenis analisis yang dipergunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas dan uji hipotesis menggunakan *paired sample t-test*.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan informasi secara umum yang berisi deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan variabel yang telah diperoleh. Menurut Ghozali (2013: 19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *maximum*, *minimum*, *sum*, *range*, dll. Teknik analisis ini tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis, teknik analisis

ini bertujuan untuk mempermudah dalam menggambarkan data yang digunakan.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal (Gunawan, 2015: 67). Analisis menggunakan metode parametrik mensyaratkan agar data penelitian memenuhi syarat normalitas, yaitu data harus berdistribusi normal. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengujian normalitas, diantaranya *Chi-Square*, *Kolmogorov Smirnov*, *Lilliefors* dan *Shapiro Wilk*. Dalam penelitian ini, metode uji normalitas menggunakan *Shapiro Wilk*. *Shapiro Wilk* dipilih karena lebih cocok untuk sampel data yang kecil. Data penelitian dikatakan normal apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05.

3. Uji *Paired Sample T-Test*

Uji *paired sample t-test* merupakan uji yang termasuk dalam golongan metode parametrik. Menurut Yamin dan Kurniawan (2014: 56) bahwa uji *paired sample t-test* digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata antara dua kelompok sampel data yang saling berkaitan/berpasangan. Sangatlah tepat menggunakan model *paired sample t-test* sebagai model analisis dalam penelitian ini. Data-data berupa rasio Kinerja Keuangan UPK pada subjek yang sama dibandingkan ketika mendapatkan suatu peristiwa, peristiwa tersebut

adalah penghentian dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan, dengan metode ini dapat diketahui pengaruh peristiwa tersebut pada sampel yang diuji.

Kemudian dasar pengambilan keputusan melihat perbandingan angka probabilitas dengan aturan:

Sig. (2-tailed) > α , dimana $\alpha = 0,05$ > H_0 didukung.

Sig. (2-tailed) < α , dimana $\alpha = 0,05$ < H_0 tidak didukung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil analisis tentang “Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelola Keuangan pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kinerja Keuangan UPK mengalami perbedaan sebelum dan sesudah diberhentikannya dana program PNPM Mandiri Perkotaan. Kinerja Keuangan UPK pada penelitian ini sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum pada bukunya yang berjudul petunjuk teknis keorganisasian dan pengawas UPK (2014: 37), yaitu *Portfolio at risk (PAR)*, *loans at risk (LAR)*, *return on investment (ROI)* dan *cost coverage (CCr)*. Berdasarkan perumusan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan sebelumnya dan hipotesis yang diajukan, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari empat bagian berupa seleksi data, statistik deskriptif, analisis uji normalitas dan hasil uji hipotesis penelitian.

A. Hasil Penelitian

1. Seleksi Data

Penelitian ini menganalisis tentang perbandingan Kinerja Keuangan UPK sebelum dan sesudah dana PNPM Mandiri Perkotaan dihentikan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari

PNPM Mandiri Perkotaan untuk Wilayah Kabupaten Bantul. Data yang digunakan untuk menghitung variabel didapat dari laporan keuangan yang telah di audit pada akhir tahun.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua BKM/LKM yang ada di Kabupaten Bantul yang berjumlah 50 BKM/LKM. Metode pengambilan data menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria tersebut adalah :

- a. BKM/LKM yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
- b. UPK telah mengumumkan laba per 31 Desember 2014 dan 2015 pada laporan keuangan setelah audit.

Tabel 1. Pelanggaran Kualifikasi Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah posisi awal	50
Data tidak sesuai kriteria	15
Jumlah sampel yang sesuai kriteria	35

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan kriteria tersebut semua BKM/LKM di Kabupaten Bantul yang berjumlah 50 BKM/LKM telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti, tetapi untuk syarat uji hipotesis yang menggunakan uji *paired sample t-test* terdapat 15 BKM/LKM yang memiliki nilai yang ekstrim dan masuk dalam kategori *outlier* sehingga harus dihapus. Jadi, terdapat 35 BKM/LKM yang sesuai dengan kriteria dan syarat untuk uji hipotesis. Adapun daftar BKM/LKM yang menjadi sampel penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar NKM/LKM Sampel Penelitian

No	Nama BKM/LKM	Desa	Kecamatan
1	LKM BANTAR	Argosari	Sedayu
2	LKM MULYO MANDIRI	Argomulyo	Sedayu
3	BKM WONOKROMO	Wonokromo	Pleret
4	LKM MAJU MAKMUR	Pleret	Pleret
5	BKM SABDORAHARJO	Sabdodadi	Bantul
6	LKM ARTA MURTI	Trimurti	Srandakan
7	LKM SIAP MANDIRI	Bawuran	Pleret
8	BKM PONCOSARI	Poncosari	Srandakan
9	LKM MAJU BERSAMA	Wonolelo	Pleret
10	BKM BANGUN DESA MANDIRI	Banguntapan	Banguntapan
11	BKM JAMBIDAN BINANGUN	Jambidan	Banguntapan
12	BKM WIJIREJO	Wijirejo	Pandak
13	BKM NGESTIMULYO	Ngestiharjo	Kasihan
14	LKM MAJU SEJAHTERA	Potorono	Banguntapan
15	BKM SRIGADING	Srigading	Sanden
16	LKM BINA KARYA MANDIRI	Triharjo	Pandak
17	BKM MURTIGADING	Murtigading	Sanden
18	LKM MEKAR DESA	Segoroyoso	Pleret
19	BKM TIRTO RAHAYU	Tirtonirmolo	Kasihan
20	BKM BANGUN MANDIRI	Bangunjiwo	Kasihan
21	BKM PANGGUNGHARJO	Panggungharjo	Sewon
22	LKM ARGODADI	Argodadi	Sedayu
23	BKM SUMBERMULYO	Sumbermulyo	Bambanglipuro
24	BKM BANTUL	Bantul	Bantul
25	LKM DADI MANDIRI	Panjangrejo	Pundong
26	LKM KARYA BUANA	Patalan	Jetis
27	BKM SELO AJI	Seloharjo	Pundong
28	BKM BANGUNHARJO	Bangunharjo	Sewon
29	BKM SEJAHTERA	Gadingsari	Sanden
30	BKM PALBAPANG	Palbapang	Bantul
31	BKM AGUNG MULYO	Sumber Agung	Jetis
32	BKM HARJO MAKMUR	Caturharjo	Pandak
33	LKM BANGKIT	Gadingharjo	Sanden
34	BKM BINA USAHA	Camden	Jetis
35	BKM PELOPOR	Srihardono	Pundong

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

2. Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dapat memberikan gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dengan menampilkan nilai *minimum*, nilai *maximum*, rata-rata (*mean*) dan *standar deviasi*. Berikut merupakan penjelasan mengenai hasil analisis statistik deskriptif yang berupa deskripsi data dari keseluruhan data yang akan dimasukkan ke dalam model penelitian. Adapun hasil analisis data pada penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	2014				2015			
		<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
LAR	35	0,15	0,60	0,371	0,11917	0,10	0,62	0,359	0,14154
PAR	35	0,71	0,86	0,771	0,04068	0,71	0,86	0,765	0,03847
ROI	35	0,04	0,59	0,328	0,10606	0,09	0,56	0,341	0,09713
CCr	35	0,12	2,37	1,317	0,46691	0,47	2,45	1,333	0,44588

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

a. *Loans at Risk (LAR)*

LAR merupakan rasio untuk menunjukkan berapa persen peminjam yang menunggak. Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap LAR menunjukkan bahwa nilai LAR terendah pada tahun 2014 sebesar 0,15 dimiliki oleh LKM Maju Bersama yang berada di Desa Wonolelo, Pleret dan pada tahun 2015 sebesar 0,10 dimiliki pada BKM Palbapang yang berada di Desa Palbapang, Bantul. Nilai tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,60 dan pada tahun 2015 sebesar 0,62 dimiliki oleh LKM Argodadi yang berada di Desa Argodadi, Sedayu. Nilai rata-rata pada LAR tahun 2014 sebesar 0,371 serta

standar deviasi sebesar 0,11917 dan pada tahun 2015 nilai rata-rata LAR tahun 2015 sebesar 0,359 serta standar deviasi sebesar 0,14154. Nilai rata-rata data pada tahun 2014 dan tahun 2015 lebih besar daripada standar deviasi, pada tahun 2014 yaitu $0,371 > 0,11917$ dan pada tahun 2015 yaitu $0,359 > 0,14154$. Hal ini berarti sebaran data LAR baik dan bersifat homogen, yakni tidak terdapat kesenjangan yang begitu besar antara nilai maksimal dan minimal pada variabel LAR pada penelitian ini.

b. Portfolio at Risk (PAR)

PAR merupakan rasio untuk menunjukkan berapa persen pinjaman yang tertunggak. Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap PAR menunjukkan bahwa nilai PAR terendah pada tahun 2014 sebesar 0,71 dimiliki oleh LKM Maju Bersama yang berada di Desa Wonolelo, Pleret dan pada tahun 2015 sebesar 0,71 dimiliki pada LKM Karya Buana yang berada di Desa Patalan, Jetis. Nilai tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,86 dimiliki oleh BKM Sejahtera yang berada di Desa Gadingsari, Sanden dan pada tahun 2015 sebesar 0,86 dimiliki oleh LKM Siap Mandiri yang berada di Desa Bawuran, Bawuran. Nilai rata-rata pada PAR tahun 2014 sebesar 0,771 serta standar deviasi sebesar 0,04068 dan pada tahun 2015 nilai rata-rata PAR tahun 2015 sebesar 0,765 serta standar deviasi sebesar 0,03847. Nilai rata-rata data pada tahun 2014 dan tahun 2015 lebih besar daripada standar deviasi, pada tahun 2014 yaitu $0,771 > 0,04068$ dan

pada tahun 2015 yaitu $0,765 > 0,03847$. Hal ini berarti sebaran data PAR baik dan bersifat homogen, yakni tidak terdapat kesenjangan yang begitu besar antara nilai maksimal dan minimal pada variabel PAR pada penelitian ini.

c. *Return on Investment (ROI)*

ROI merupakan rasio untuk menunjukkan kemampuan UPK untuk menghasilkan laba dari modal. Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap ROI menunjukkan bahwa nilai ROI terendah pada tahun 2014 sebesar 0,04 dimiliki oleh LKM Mulyo Mandiri yang berada di Desa Argomulyo, Sedayu dan pada tahun 2015 sebesar 0,09 dimiliki pada BKM Sejahtera yang berada di Desa Gadingsari, Sanden. Nilai tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,59 dan pada tahun 2015 sebesar 0,56 dimiliki oleh LKM Mekar Desa yang berada di Desa Segoroyoso, Pleret. Nilai rata-rata pada ROI tahun 2014 sebesar 0,328 serta standar deviasi sebesar 0,10606 dan pada tahun 2015 nilai rata-rata ROI tahun 2015 sebesar 0,341 serta standar deviasi sebesar 0,09713. Nilai rata-rata data pada tahun 2014 dan tahun 2015 lebih besar daripada standar deviasi, pada tahun 2014 yaitu $0,328 > 0,10606$ dan pada tahun 2015 yaitu $0,341 > 0,09713$. Hal ini berarti sebaran data ROI baik dan bersifat homogen, yakni tidak terdapat kesenjangan yang begitu besar antara nilai maksimal dan minimal pada variabel ROI pada penelitian ini.

d. *Cost Coverage Ratio (ROI)*

CCr merupakan rasio untuk menunjukkan kemampuan UPK untuk menutup biaya dari pendapatan yang diperoleh. Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap CCr menunjukkan bahwa nilai CCr terendah pada tahun 2014 sebesar 0,12 dimiliki oleh LKM Maju Bersama yang berada di Desa Wonolelo, Pleret dan pada tahun 2015 sebesar 0,47 dimiliki pada BKM Palbapang yang berada di Desa Palbapang, Bantul. Nilai tertinggi pada tahun 2014 sebesar 2,37 dan pada tahun 2015 sebesar 2,45 dimiliki oleh LKM Argodadi yang berada di Desa Sedayu, Bantul. Nilai rata-rata pada CCr tahun 2014 sebesar 1,317 serta standar deviasi sebesar 0,46691 dan pada tahun 2015 nilai rata-rata CCr tahun 2015 sebesar 1,333 serta standar deviasi sebesar 0,44588. Nilai rata-rata data pada tahun 2014 dan tahun 2015 lebih besar daripada standar deviasi, pada tahun 2014 yaitu $1,317 > 0,46691$ dan pada tahun 2015 yaitu $1,333 > 0,44588$. Hal ini berarti sebaran data CCr baik dan bersifat homogen, yakni tidak terdapat kesenjangan yang begitu besar antara nilai maksimal dan minimal pada variabel CCr pada penelitian ini.

3. Hasil Penelitian

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel tersebut memiliki distribusi normal atau tidak, karena syarat dalam

pengujian hipotesis menggunakan uji *paired sample t-test* adalah variabel tersebut harus memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *shapiro – wilk*.

Terdapat sebagian data yang tidak berdistribusi normal yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,05. Data yang tidak berdistribusi normal dapat diubah menjadi berdistribusi normal dengan cara ditransformasikan. Sebelum data tersebut ditransformasikan, perlu diketahui bagaimana bentuk histogramnya. Pada penelitian ini histogram berbentuk *moderate positive skewness* sehingga menggunakan transformasi $\text{SQRT}(x)$ atau akar kuadrat dan juga ada beberapa data yang memiliki nilai ekstrem sehingga menimbulkan data *outlier*, sehingga pada data *outlier* harus dihapus. Setelah data ditransformasi, dilakukan pengujian normalitas.

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan pada empat variabel data rasio, yaitu : LAR, PAR, ROI, CCr. Masing-masing variabel terdiri atas data rasio keuangan sebelum dan sesudah bantuan dana PNPM Mandiri Perkotaan dihentikan yaitu tahun 2014 dan 2015. Pada penelitian ini, data terdistribusi normal apabila nilai probabilitas $> 0,05$. Adapun hasil pengujian normalitas data penelitian diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Pengujian Normalitas Data

Variabel	Tahun	Sig.	Kesimpulan
LAR	2014	0,209	Normal
	2015	0,096	Normal
PAR	2014	0,258	Normal
	2015	0,060	Normal
ROI	2014	0,175	Normal
	2015	0,127	Normal
CCr	2014	0,069	Normal
	2015	0,151	Normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Dari hasil uji normalitas, menghasilkan sesuai data Tabel 4, nilai *Sig.* lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria uji normalitas yang disyaratkan harus lebih besar dari 5%, maka disimpulkan bahwa data penelitian telah berdistribusi normal.

b. Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji *paired sample t-test* terhadap empat variabel data rasio pengukuran Kinerja Keuangan UPK yaitu LAR, PAR, ROI dan CCr. Hasil uji hipotesis untuk empat variabel pengukuran Kinerja Keuangan UPK sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

		Paired Differences			df	Sig. (2-tailed)
		Mean	95% Confidence Interval of the Difference			
			Lower	Upper		
Pair 1	LAR_2014-LAR_2015	0,01094	-0,01242	0,0343	34	0,348
Pair 1	PAR_2014-PAR_2015	0,00600	-0,00609	0,01809	34	0,320
Pair 1	ROI_2014-ROI_2015	-0,01294	-0,02408	-0,0018	34	0,024
Pair 1	CCr_2014-CCr_2015	-0,01622	-0,08525	0,0528	34	0,636

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan pengujian *paired sample t-test*, dapat diketahui nilai signifikansinya. Hipotesis dapat disimpulkan dengan kriteria sebagai berikut :

Sig. (2-tailed) > α , dimana $\alpha = 0,05$ > H0 didukung

Sig. (2-tailed) < α , dimana $\alpha = 0,05$ < H0 tidak didukung

Berdasarkan kriteria penarikan kesimpulan hipotesis tersebut maka kesimpulan atas uji hipotesis dapat diringkas dalam Tabel 6 :

Tabel 6. Ringkasan Kesimpulan Uji Hipotesis

Variabel	Periode	Mean Statistik	Uji t		Keputusan penelitian
			Mean	Sign.	
LAR	2014	0,3708	0,01094	0,348	H1 tidak didukung
	2015	0,3598			
PAR	2014	0,7710	0,00600	0,320	H2 tidak didukung
	2015	0,7650			
ROI	2014	0,3280	-0,01294	0,024	H3 didukung
	2015	0,3410			
CCr	2014	1,3170	-0,01622	0,636	H4 tidak didukung
	2015	1,3333			

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Hasil pengujian rasio Kinerja Keuangan UPK sebelum dan sesudah dihentikannya bantuan dana dari pemerintah menggunakan *paired sample t-test* dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Uji Rasio Kinerja Keuangan UPK

No	Variabel	Sig.	Kesimpulan	Keterangan
1	LAR	0,348	H1 tidak terdukung	Tidak terdapat perbedaan <i>Loans at Risk</i> (LAR) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.
2	PAR	0,320	H2 tidak terdukung	Tidak terdapat perbedaan <i>Portfolio at Risk</i> (PAR) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.
3	ROI	0,024	H3 terdukung	Terdapat perbedaan <i>Return on Investment</i> (ROI) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.
4	CCr	0,636	H4 tidak terdukung	Tidak terdapat perbedaan <i>Cost Coverage</i> (CCr) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

B. Pembahasan

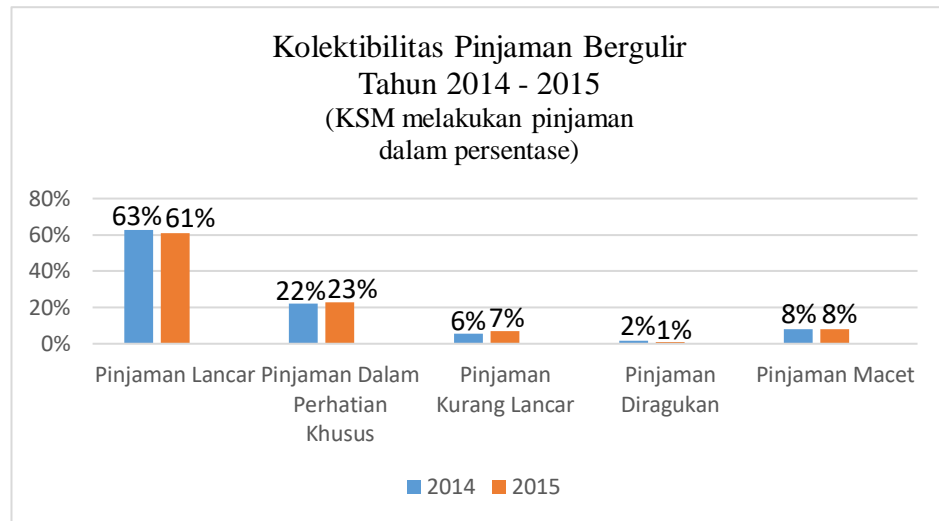
1. Perbedaan *Loans at Risk* (LAR) Sebelum dan Sesudah Penghentian Bantuan Dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015

Berdasarkan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai signifikansi untuk variabel LAR sebesar 0,348. Besarnya nilai signifikansi lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada aspek *Loans at Risk* (LAR) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015, dengan demikian

dapat dinyatakan bahwa adanya penghentian dana bantuan pada PNPM Mandiri Perkotaan tidak mempengaruhi pada aspek LAR.

LAR merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan berapa persen peminjam yang menunggak dalam pengembalian pinjaman yang lebih dari 3 bulan. Pada indikator ini menunjukkan bahwa semakin kecil hasil pada LAR maka akan semakin baik bagi UPK. Hasil uji hipotesis di atas menunjukkan bahwa dengan adanya pemberhentian bantuan dana PNPM Mandiri Perkotaan kurang memberikan perbedaan terhadap LAR tetapi jika dilihat dari rata-rata pada LAR mengalami penurunan walaupun sangat kecil yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,3708 dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,3598, terjadi penurunan sebesar 0,0118. Adanya penurunan dari rata-rata sebesar 0,0118 menunjukkan bahwa UPK yang ada di Wilayah Bantul telah berupaya untuk mengurangi KSM tertunggak dalam angsuran yang lebih dari 3 bulan.

Total KSM yang telah melakukan pinjaman bergulir di Kabupaten Bantul pada tahun 2014 sebesar 2.302 KSM dan pada tahun 2015 sebesar 2.626 KSM. Pengelompokan KSM pada kolektibilitas pinjaman bergulir sesuai dengan Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kolektibilitas Pinjaman Bergulir Tahun 2014-2015 (KSM melakukan pinjaman dalam persentase)

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa KSM yang melakukan pinjaman bergulir dalam kategori pinjaman lancar pada tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 2%, pada tahun 2014 sebesar 63% atau 1.443 KSM dan pada tahun 2015 menjadi 61% atau 1.593 KSM. KSM yang melakukan pinjaman bergulir dalam kategori pinjaman dalam perhatian khusus tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 1%, pada tahun 2014 sebesar 22% atau 506 KSM dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 23% atau 614 KSM.

KSM yang melakukan pinjaman bergulir dalam kategori pinjaman kurang lancar pada tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 1%, pada tahun 2014 sebesar 6% atau 128 KSM menjadi 7% atau 175 KSM pada tahun 2015. KSM yang melakukan pinjaman bergulir dalam kategori pinjaman diragukan tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 1%, pada tahun 2014 sebesar 2% atau 40 KSM dan pada tahun 2015 sebesar 1% atau 36 KSM. KSM yang

melakukan pinjaman bergulir dalam kategori pinjaman macet tahun 2014 sampai dengan 2015 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu pada tahun 2014 sebesar 8% atau 185 KSM dan pada tahun 2015 sebesar 4% atau sekitar 208 KSM.

Berdasarkan data di atas, bahwa UPK dalam melaksanakan pinjaman bergulir telah berusaha secara sungguh-sungguh walaupun pada pinjaman lancar mengalami penurunan persentase dari 63% menjadi 61% yang mengakibatkan pada kategori pinjaman dalam perhatian khusus mengalami perubahan dari 22% menjadi 23% dan pada kategori pinjaman kurang lancar mengalami perubahan dari 6% menjadi 7%, tetapi UPK telah berusaha menurunkan kategori pinjaman diragukan dari 2% menjadi 1%. Pinjaman diragukan juga termasuk dalam permasalahan yang serius yang dihadapi oleh UPK, karena dari kebanyakan pinjaman diragukan jika tidak ditangani secara serius akan berpotensi menjadi pinjaman dalam kategori macet.

Pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet dikarenakan KSM terlambat dalam membayar angsuran lebih dari tiga bulan. KSM yang terlambat membayar dapat disebabkan banyak hal, seperti usaha yang dibangun dengan modal pinjaman tidak dapat bertahan ataupun bangkrut sehingga uang tersebut tidak dapat diputar kembali, dan juga pada pinjaman bergulir tidak adanya agunan sehingga KSM yang meminjam tidak merasa terbebani dengan adanya tunggakan pinjaman. Usaha yang dapat dilakukan UPK untuk mengurangi peminjam yang

menunggak salah satunya dengan memberikan sosialisasi kepada KSM pentingnya melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman, pemberian sosialisasi sendiri dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah KSM yang melakukan pinjaman, melakukan pendekatan kepada KSM seperti mengundang KSM ketika acara syawalan, rembug warga, rapat tentang pinjaman KSM dan disela-sela acara mensosialisasikan tentang pentingnya pinjaman bergulir. Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh Wira dan Chandra (2013) bahwa jika banyak KSM yang menunggak maka UPK harus mengintensifkan penagihan tunggakan.

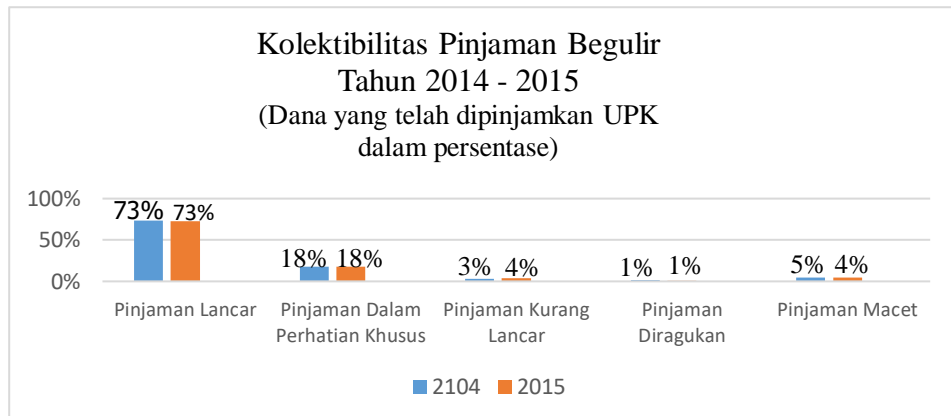
Pinjaman bergulir sangat penting bagi masyarakat maupun keberlangsungan BKM/LKM, karena pinjaman yang diberikan ke masyarakat akan membantu masyarakat dalam hal keuangan, selanjutnya dengan pelunasan pinjaman bergulir maka dana tersebut dapat dipinjamkan ke masyarakat lain yang membutuhkan dan UPK akan mendapatkan laba dari pinjaman bergulir, laba yang didapat dari pinjaman bergulir akan dibagikan kepada tiga unit BKM/LKM sesuai dengan ketentuan yang disepakati masing-masing BKM/LKM, sehingga dana tersebut akan kembali ke masyarakat juga. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2015) bahwa dengan banyaknya KSM yang menunggak akan dikhawatirkan dapat mempengaruhi laba yang di hasilkan UPK.

2. Perbedaan *Portfolio at Risk* (PAR) Sebelum dan Sesudah Penghentian Bantuan Dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015

Berdasarkan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai signifikansi untuk variabel PAR sebesar 0,320. Besarnya nilai signifikansi lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada aspek *Portfolio at Risk* (PAR) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa adanya penghentian dana bantuan pada PNPM Mandiri Perkotaan tidak mempengaruhi pada aspek PAR.

PAR merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan berapa persen pinjaman yang tertunggak lebih dari 3 bulan. Pada indikator ini menunjukkan bahwa semakin kecil pada hasil PAR maka akan semakin baik bagi UPK. Hasil uji hipotesis di atas menunjukkan bahwa dengan adanya pemberhentian bantuan dana PNPM Mandiri Perkotaan kurang memberikan perbedaan terhadap PAR tetapi jika dilihat dari rata-rata pada PAR mengalami penurunan walaupun sangat kecil yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,7710 dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,7650, terjadi penurunan sebesar 0,006. Adanya penurunan dari rata-rata sebesar 0,006 menunjukkan bahwa UPK yang ada di Wilayah Bantul telah berupaya untuk mengurangi angsuran pinjaman yang tertunggak lebih dari 3 bulan pada pinjaman bergulir.

Total dana pinjaman bergulir yang telah dipinjamkan kepada masyarakat bantul pada tahun 2014 sebesar Rp12.858.865.651 dan pada tahun 2015 sebesar Rp15.025.875.028. Pengelompokan pada kolektibilitas pinjaman bergulir sesuai dengan Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Kolektibilitas Pinjaman Bergulir Tahun 2014-2015 (Dana yang telah dipinjamkan UPK dalam persentase)

Dari Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa pada pinjaman lancar tahun 2014 sampai dengan 2015 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu 73%, pada tahun 2014 sebesar Rp.9.442.632.852,00 dan pada tahun 2015 sebesar 10.940.346.814,00. Pinjaman dalam perhatian khusus tahun 2014 sampai dengan 2015 juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu 18%, pada tahun 2014 sebesar Rp2.254.160.386,00 dan pada tahun 2015 sebesar Rp2.722.767.375,00. Pinjaman kurang lancar tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 1%, pada tahun 2014 sebesar 3% atau sekitar Rp409.786.331,00 menjadi 4% atau sekitar Rp546.378.876,00 pada tahun 2015. Pinjaman diragukan tahun 2014 sampai dengan 2015 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu sebesar 1%, pada tahun 2014

sebesar Rp150.301.991,00 dan pada tahun 2015 sebesar Rp162.997.466,00. Pinjaman macet tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 1%, pada tahun 2014 sebesar 5% atau sekitar Rp601.984.091,00 menjadi 4% atau sekitar Rp653.384.497,00.

Berdasarkan data di atas, bahwa UPK telah berusaha secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan pinjaman bergulir. Hal itu dibuktikan dengan adanya perubahan persentase pada pinjaman macet dari 5% menjadi 4%. Pinjaman macet merupakan suatu masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh UPK, karena dengan adanya pinjaman macet banyak dana UPK yang tidak dapat dipinjamkan lagi ke masyarakat lain yang membutuhkan dan juga mengurangi pendapatan UPK dalam menjalankan pinjaman bergulir maka sebisa mungkin UPK sebaiknya berusaha untuk mengurangi pinjaman yang macet. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2015) bahwa dana yang dipinjamkan ke masyarakat jika terjadi kemacetan angsuran akan mengakibatkan dana tersebut tidak dapat dipinjamkan ke masyarakat yang lain, masyarakat yang lain harus menunggu adanya pembayaran dari anggota yang telah meminjam sebelumnya. Prinsip dari dana bergulir adalah modal yang diberikan pada BKM yang merupakan modal permanen harus dapat dikembalikan dan digulirkan kembali ke masyarakat. Kemacetan yang cukup tinggi tentunya akan menghambat perguliran dana ke masyarakat.

3. Perbedaan *Return on Investment* Sebelum dan Sesudah Penghentian Bantuan Dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015

Berdasarkan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai signifikansi untuk variabel ROI sebesar 0,024. Besarnya nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada aspek *Return on Investment* (ROI) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa adanya penghentian dana bantuan pada PNPM Mandiri Perkotaan berpengaruh terhadap aspek ROI.

ROI merupakan indikator untuk mengukur bagaimana kemampuan UPK untuk menghasilkan laba dari modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir. Pada indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar hasil dari ROI maka akan semakin baik bagi UPK. Hasil uji hipotesis diatas menunjukkan bahwa dengan adanya pemberhentian bantuan dana PNPM Mandiri Perkotaan terdapat perbedaan terhadap ROI. Dilihat dari hasil rata-rata pada ROI mengalami peningkatan sebesar 0,13 yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,3280 dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,3410. Adanya peningkatan tersebut UPK telah berupaya dalam meningkatkan pendapatan UPK untuk menjaga keberlangsungannya.

UPK dalam menjaga keberlangsungan usahanya yaitu dengan meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku pada buku pedoman petunjuk teknis pinjaman bergulir, supaya tidak membebani masyarakat dalam melakukan pinjaman karena adanya pinjaman bergulir juga untuk membantu ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh UPK untuk meningkatkan pendapatannya yaitu dengan mempermudah KSM dalam melakukan pinjaman bergulir tetapi juga harus sesuai dengan aturan sesuai pada buku pedoman petunjuk teknis pinjaman bergulir seperti fleksibilitasnya waktu antara pengurus UPK dengan KSM ketika melakukan pengurusan pinjaman bergulir, pemberian informasi yang lengkap dan mudah dipahami oleh KSM dalam hal pinjaman bergulir. UPK juga memberikan kemudahan ketika KSM melakukan angsuran, seperti fleksibilitasnya waktu dalam pembayaran angsuran dan juga UPK menerima berapapun angsuran yang akan dibayarkan oleh KSM walaupun tidak sesuai dengan perjanjian awal pinjaman, yang terpenting adalah adanya kemauan UPK dalam melakukan angsuran. UPK di wilayah Kabupaten Bantul rata-rata pada pelaksanaan pinjaman bergulir menggunakan sistem Bunga *Flat* yaitu perhitungan suku bunga yang besarnya mengacu pada pokok hutang awal. Penggunaan dalam bunga *flat* memang biasa digunakan oleh pinjaman tanpa agunan.

4. Perbedaan *Cost Coverage* Sebelum dan Sesudah Penghentian Bantuan Dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015

Berdasarkan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai Signifikansi untuk variabel LAR sebesar 0,636. Besarnya nilai signifikansi lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada aspek *Cost Coverage* (CCr) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa adanya penghentian dana bantuan pada PNPM Mandiri Perkotaan tidak mempengaruhi pada aspek CCr.

CCr merupakan indikator untuk mengukur bagaimana kemampuan UPK untuk menutupi biaya dari pendapatan yang diperoleh. Pada indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar pada hasil CCr maka akan semakin baik bagi UPK. Hasil uji hipotesis diatas menunjukkan bahwa dengan adanya pemberhentian bantuan dana PNPM Mandiri Perkotaan kurang memberikan perbedaan terhadap CCr tetapi jika dilihat dari rata-rata pada CCr mengalami kenaikan walaupun sangat kecil yaitu pada tahun 2014 sebesar 1,3170 dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 1,3333, terjadi kenaikan sebesar 0,0163. Adanya kenaikan dari rata-rata sebesar 0,0163 menunjukkan bahwa UPK yang ada di Wilayah Bantul telah berupaya untuk menutupi biaya yang dikeluarkan menggunakan pendapatan yang diperoleh.

UPK dalam menjaga keberlangsungan usahanya, selain dengan meningkatkan pendapatannya juga harus memperhitungkan bagaimana dalam mengelola biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan UPK sebaiknya diminalkan sebaik mungkin dan digunakan semaksimal mungkin agar laba dari UPK akan tinggi, salah satu cara dalam mengurangi biaya-biaya yang berlebih adalah bila UPK berada jauh dari bank guna untuk melakukan penyetoran angsuran dari KSM, sebaiknya dilakukan dalam berkala sehingga akan mengurangi biaya untuk transportasi dan dapat meminimalkan biaya-biaya yang lain tetapi meminimalkan biaya UPK juga harus melihat kesejahteraan dari para petugas UPK yang telah bekerja secara sukarela. Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh Wira dan Chandra (2013) bahwa UPK sebisa mungkin untuk memperkecil pengeluaran dan memaksimalkan pendapatannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Tidak terdapat perbedaan pada *Loans at Risk* (LAR) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.
2. Tidak terdapat perbedaan pada *Portfolio at Risk* (PAR) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.
3. Terdapat perbedaan pada *Return on Investment* (ROI) sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.
4. Tidak terdapat perbedaan pada *Cost Coverage* (CCr) baik sebelum dan sesudah penghentian bantuan dana pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2014 dan 2015.

B. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan setelah audit UPK di Kabupaten Bantul dan data yang digunakan terbatas selama satu tahun sebelum dan sesudah penghentian dana PNPM Mandiri Perkotaan.

2. Penelitian ini tidak meneliti rasio kinerja keuangan secara mendalam dan beragam.
3. Analisis Kinerja Keuangan UPK dalam penelitian ini berdasarkan laporan keuangan setelah audit, dimana laporan tahunan tidak memperlihatkan dan mempertimbangkan dengan pasti faktor-faktor eksternal seperti adat masyarakat, hukum, kondisi masyarakat, tipe masyarakat yang tentunya ikut mempengaruhi Kinerja Keuangan UPK.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya penanganan khusus terhadap pinjaman kategori macet dengan peninjauan lapangan dan evaluasi terhadap kemampuan KSM dalam mengembalikan sisa pinjaman. Penanganan ini mungkin bisa dengan pendekatan kepada KSM yang menunggak per anggota KSM.
2. Pencapaian Kinerja Keuangan UPK yang telah dianggap baik agar dipertahankan, bagi pencapaian Kinerja Keuangan UPK dan dianggap kurang agar ditingkatkan.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar, seperti menambahkan wilayah kabupaten lain dan menambah jumlah tahun sebelum dan sesudah. waktu yang pendek ini, kemungkinan kurang mewakili pengukuran Kinerja Keuangan UPK.

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan beberapa rasio kinerja keuangan yang lebih mendalam dan beragam supaya menambah informasi yang dapat diperoleh.
5. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan faktor-faktor eksternal yang kemungkinan mempengaruhi Kinerja Keuangan UPK, karena pinjaman bergulir sangat berkaitan dengan masyarakat, sedangkan masyarakat mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Yunita dan Puranto Hendra. (2010). *"Anggaran Berbasis Kinerja; Penyusunan APBD Secara Komprehensif"*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Arikunto, Suharsini. (2013). *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. (2014). *"Bantul Dalam Angka Tahun 2014"*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Bantul.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. (2015). *"Bantul Dalam Angka Tahun 2015"*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Bantul.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. (2015). *"Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul 2015"*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Bantul.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *"Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008"*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bastian, Indra. (2001). *"Akuntansi Sektor Publik"*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Marcus, A. J. (2012). *"The Fundamental of Corporate Finance (10th ed.)"*. New York: McGraw-Hill.
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementrian Pekerjaan Umum. (2014). *"Petunjuk Teknis Pendampingan, Pencairan Dan Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)"*.
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementrian Pekerjaan Umum. (2014). *"Petunjuk Teknis Pembukuan Unit Pengelola Keuangan (UPK)"*.
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementrian Pekerjaan Umum. (2014). *"Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir"*.
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementrian Pekerjaan Umum. (2014). *"Petunjuk Teknis Keorganisian dan Pengawasan UPK)"*.
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementrian Pekerjaan Umum. (2014). *"Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan"*.
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementrian Pekerjaan Umum. (2014). *"Modul Khusus Komunitas BKM/LKM Tugas dan Fungsi BKM"*.

- Ghozali, Imam. (2013). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, M A. (2015). *“Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi dan Sosial”*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Hasan, Iqbal. (2008). *“Analisis Data Penelitian Dengan Statisik”*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hidayat, Agus Taufik. (2015). *“Analisis Efektifitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri di Kecamatan Mijiwarno Kabupaten Jombang Tahun 2014”*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 3, No. 1.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *“Standar Akuntansi Keuangan”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementrian Dalam Negeri. (2016). *“Kemendagri Telah Serah terimakan PNPM ke Kemendes”*. Diakses tanggal 9 Mei 2017 dari <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/03/07/kemendagri-telah-serahterimakan-pnpm-ke-kemendes> .
- Mulyadi. (2001). *“Balance Scorecard: alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2007). *“Balanced Scorecard : Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan, Edisi kelima”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novianto, Efri. (2012). *“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara”*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Oktaviani, Ika Dewi. (2015). *“Analisi Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Melakukan Merger Dan Akuisisi Pada Tahun 2000-2010”*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.05 / 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro”*.
- Purnomo, Danarti dan Sukdjo. (2015). *“Analisis Kinerja Unit Pengelola Keuangan Dan Unit Pengelola Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada BKM Ngudi Makmur Desa Semanu Kabupaten Gunung Kidul”*, di Universitas Negeri Yogyakarta.

- Sawir, Agnes. (2009). *“Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan keeuangan Perusahaan”*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Septiani, Andri. (2014). *“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Setelah Diterapkannya PP 06/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Slamet & Sarsiti. (2014). *“Analisis Pengaruh Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat, Pinjaman Bergullir, Pelatihan Dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Melalui Program PNPM-Mandiri Perkotaan Di Desa Tunggorono Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo”*, di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sucipto. (2003). *“Penilaian Kinerja Keuangan”*. Jurnal Akuntansi. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Sugiyono. (2015). *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D”*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisna. (2009). *“Manajemen keuangan teori konsep dan aplikasi”*. Yogyakarta: ekoisia.
- Yamin, Sofyan dan Kurniawan, Heri. (2014). *“SPSS Complete Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS”*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Yuwono, S.R., Sukarno, E., Ichsan, M. (2006). *“Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard, cet. 4”*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wira, Variyetmi dan Chandra Benny. (2013). *“Evaluasi Kinerja Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Koto Tengah”*. Polibisnis, Volume 5, No 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar BKM/LKM di Kabupaten Bantul

No	Nama BKM/LKM	Desa	Kecamatan
1	LKM BANTAR	Argosari	Sedayu
2	LKM MULYO MANDIRI	Argomulyo	Sedayu
3	BKM WONOKROMO	Wonokromo	Pleret
4	LKM MAJU MAKMUR	Pleret	Pleret
5	BKM SABDORAHARJO	Sabdodadi	Bantul
6	LKM ARTA MURTI	Trimurti	Srandakan
7	LKM SIAP MANDIRI	Bawuran	Pleret
8	BKM PONCOSARI	Poncosari	Srandakan
9	LKM MAJU BERSAMA	Wonolelo	Pleret
10	BKM BANGUN DESA MANDIRI	Banguntapan	Banguntapan
11	BKM JAMBIDAN BINANGUN	Jambidan	Banguntapan
12	BKM WIJIREJO	Wijirejo	Pandak
13	BKM NGESTIMULYO	Ngestiharjo	Kasihan
14	LKM MAJU SEJAHTERA	Potorono	Banguntapan
15	BKM SRIGADING	Srigading	Sanden
16	LKM BINA KARYA MANDIRI	Triharjo	Pandak
17	BKM MURTIGADING	Murtigading	Sanden
18	LKM MEKAR DESA	Segoroyoso	Pleret
19	BKM TIRTO RAHAYU	Tirtonirmolo	Kasihan
20	BKM BANGUN MANDIRI	Bangunjiwo	Kasihan
21	BKM PANGGUNGHARJO	Panggungharjo	Sewon
22	LKM ARGODADI	Argodadi	Sedayu
23	BKM SUMBERMULYO	Sumbermulyo	Bambanglipuro
24	BKM BANTUL	Bantul	Bantul
25	LKM DADI MANDIRI	Panjangrejo	Pundong
26	LKM KARYA BUANA	Patalan	Jetis
27	BKM SELO AJI	Seloharjo	Pundong
28	BKM BANGUNHARJO	Bangunharjo	Sewon
29	BKM SEJAHTERA	Gadingsari	Sanden
30	BKM PALBAPANG	Palbapang	Bantul
31	BKM AGUNG MULYO	Sumber Agung	Jetis
32	BKM HARJO MAKMUR	Caturharjo	Pandak
33	LKM BANGKIT	Gadingharjo	Sanden
34	BKM BINA USAHA	Canden	Jetis
35	BKM PELOPOR	Srihardono	Pundong

Lampiran 2. Daftar LAR pada BKM/LKM di Kabupaten Bantul

No	Nama Desa	2014		Hasil	2015		Hasil
		Jumlah KSM Menunggak Lebih dari 3 bulan	Jumlah KSM yang meminjam		Jumlah KSM Menunggak Lebih dari 3 bulan	Jumlah KSM yang meminjam	
1	Argosari	4	31	13%	5	37	14%
2	Argomulyo	8	33	24%	6	33	18%
3	Wonokromo	6	58	10%	6	65	9%
4	Pleret	13	148	9%	13	148	9%
5	Sabdodadi	9	55	16%	11	72	15%
6	Trimurti	54	231	23%	78	232	34%
7	Bawuran	6	26	23%	14	36	39%
8	Poncosari	11	121	9%	10	147	7%
9	Wonolelo	1	44	2%	2	47	4%
10	Banguntapan	12	50	24%	19	53	36%
11	Jambidan	22	155	14%	24	161	15%
12	Wijirejo	29	123	24%	31	117	26%
13	Ngestiharjo	32	154	21%	44	161	27%
14	Potorono	5	96	5%	6	70	9%
15	Srigading	6	72	8%	6	78	8%
16	Triharjo	8	87	9%	7	111	6%
17	Murtigading	5	77	6%	5	77	6%
18	Segoroyoso	1	39	3%	1	41	2%
19	Tirtonirmolo	6	70	9%	5	72	7%
20	Bangunjiwo	14	65	22%	12	67	18%
21	Panggunharjo	5	22	23%	6	22	27%
22	Argodadi	11	31	35%	11	29	38%
23	Sumbermulyo	16	66	24%	11	121	9%
24	Bantul	5	58	9%	5	59	8%
25	Panjangrejo	3	41	7%	13	148	9%
26	Patalan	3	51	6%	1	58	2%
27	Seloharjo	5	26	19%	4	37	11%
28	Bangunharjo	18	67	27%	17	68	25%
29	Gadingsari	4	31	13%	11	121	9%
30	Palbapang	4	87	5%	1	93	1%
31	Sumber Agung	22	116	19%	12	117	10%
32	Caturharjo	1	24	4%	1	25	4%
33	Gadingharjo	2	19	11%	3	35	9%
34	Canden	12	61	20%	14	71	20%
35	Srihardono	3	9	33%	3	10	30%

Lampiran 3. Daftar PAR pada BKM/LKM di Kabupaten Bantul

No	Nama Desa	2014		Hasil	2015		Hasil
		Pinjaman tertunggak lebih dari 3 bulan	Realisasi saldo pinjaman		Pinjaman tertunggak lebih dari 3 bulan	Realisasi saldo pinjaman	
1	Argosari	18.520.000	162.620.000	11%	15.655.000	251.405.000	6%
2	Argomulyo	31.719.699	274.398.633	12%	26.717.699	282.314.633	9%
3	Wonokromo	44.802.350	373.639.720	12%	53.913.700	590.487.850	9%
4	Pleret	24.769.150	606.054.244	4%	24.769.150	606.054.244	4%
5	Sabdodadi	23.460.000	336.720.000	7%	16.210.000	375.800.000	4%
6	Trimurti	170.326.475	1.070.337.025	16%	223.340.325	1.132.748.359	20%
7	Bawuran	10.450.000	146.520.000	7%	31.590.000	132.880.000	24%
8	Poncosari	22.727.500	415.595.000	5%	22.404.250	544.456.000	4%
9	Wonolelo	1.680.000	274.433.000	1%	9.580.000	311.188.500	3%
10	Banguntapan	41.972.300	252.806.050	17%	64.332.050	290.473.050	22%
11	Jambidan	22.582.000	617.453.000	4%	27.782.000	735.931.000	4%
12	Wijirejo	57.157.000	538.339.100	11%	98.432.900	752.176.700	13%
13	Ngestiharjo	95.078.200	758.999.800	13%	155.280.600	996.161.000	16%
14	Potorono	10.407.024	378.132.000	3%	32.524.500	411.012.000	8%
15	Srigading	18.563.700	220.303.400	8%	14.372.200	261.119.900	6%
16	Triharjo	36.967.500	334.427.500	11%	33.777.500	351.575.000	10%
17	Murtigading	15.220.050	842.179.050	2%	15.220.050	842.179.050	2%
18	Segoroyoso	2.400.000	289.540.000	1%	12.445.000	382.160.000	3%
19	Tirtonirmolo	13.697.500	527.145.000	3%	57.885.000	725.958.500	8%
20	Bangunjiwo	64.431.100	341.268.500	19%	58.369.100	421.183.700	14%
21	Panggunharjo	15.373.600	119.998.600	13%	15.978.333	123.525.000	13%
22	Argodadi	45.228.000	209.860.000	22%	38.023.000	218.256.600	17%
23	Sumbermulyo	32.403.000	479.863.100	7%	22.727.500	415.595.000	5%
24	Bantul	8.060.000	134.510.000	6%	7.760.000	141.210.000	5%
25	Panjangrejo	5.081.800	288.821.200	2%	24.769.150	606.054.244	4%
26	Patalan	32.787.500	399.546.850	8%	1.730.000	405.342.500	0%
27	Seloharjo	12.050.000	107.300.000	11%	14.200.000	213.560.000	7%
28	Bangunharjo	99.200.800	698.321.950	14%	86.450.900	737.931.600	12%
29	Gadingsari	31.715.000	128.606.200	25%	22.727.500	415.595.000	5%
30	Palbapang	18.222.200	333.305.920	5%	3.294.500	385.926.144	1%
31	Sumber Agung	102.176.500	728.962.900	14%	61.100.500	729.644.300	8%
32	Caturharjo	2.332.416	187.357.416	1%	2.332.416	238.348.416	1%
33	Gadingharjo	24.415.000	115.367.500	21%	18.747.500	140.809.500	13%
34	Canden	21.675.850	280.297.150	8%	37.669.350	410.988.150	9%
35	Srihardono	5.982.500	41.455.837	14%	5.982.500	47.960.834	12%

Lampiran 4. Daftar ROI pada BKM/LKM di Kabupaten Bantul

No	Nama Desa	2014		Hasil	2015		Hasil
		Laba Bersih	Modal Investasi		Laba Bersih	Modal Investasi	
1	Argosari	20.895.106	225.271.150	9%	31.501.292	239.493.703	13%
2	Argomulyo	369.701	260.039.958	0%	5.353.738	242.207.330	2%
3	Wonokromo	84.054.171	533.874.046	16%	100.175.297	567.496.217	18%
4	Pleret	74.520.255	655.707.053	11%	75.543.393	678.063.130	11%
5	Sabdodadi	60.470.610	342.288.812	18%	66.269.317	372.524.117	18%
6	Trimurti	130.659.437	1.179.667.782	11%	138.330.434	1.225.525.403	11%
7	Bawuran	22.073.391	187.462.048	12%	24.180.023	192.850.939	13%
8	Poncosari	64.057.930	575.350.374	11%	89.823.412	594.408.304	15%
9	Wonolelo	31.342.415	222.682.456	14%	37.736.258	224.999.921	17%
10	Banguntapan	22.775.019	533.251.217	4%	25.726.247	540.089.236	5%
11	Jambidan	127.672.507	556.632.827	23%	131.142.313	620.469.334	21%
12	Wijirejo	94.232.775	742.729.581	13%	99.071.875	815.962.356	12%
13	Ngestiharjo	90.310.521	799.756.824	11%	101.895.388	845.635.520	12%
14	Potorono	54.439.294	304.675.315	18%	66.565.967	326.464.609	20%
15	Srigading	36.532.337	459.586.865	8%	42.969.550	466.919.202	9%
16	Triharjo	41.335.739	311.971.214	13%	27.874.180	312.061.106	9%
17	Murtigading	113.538.670	884.708.409	13%	122.679.680	913.092.079	13%
18	Segoroyoso	78.825.856	223.231.335	35%	81.675.748	262.644.263	31%
19	Tirtonirmolo	90.336.367	814.734.072	11%	97.431.417	796.657.705	12%
20	Bangunjiwo	48.401.650	558.971.144	9%	57.720.493	572.523.606	10%
21	Panggunharjo	11.440.549	404.567.248	3%	15.310.575	409.143.468	4%
22	Argodadi	37.030.091	285.584.318	13%	47.074.943	300.396.409	16%
23	Sumbermulyo	74.011.693	526.747.009	14%	87.325.851	541.868.448	16%
24	Bantul	15.301.774	257.752.164	6%	13.335.029	263.872.938	5%
25	Panjangrejo	53.805.019	310.802.999	17%	68.462.515	348.346.268	20%
26	Patalan	47.224.484	270.053.386	17%	51.618.530	288.943.180	18%
27	Seloharjo	25.034.044	355.279.872	7%	32.281.074	402.678.516	8%
28	Bangunharjo	96.218.868	851.784.632	11%	99.728.937	871.028.500	11%
29	Gadingsari	3.085.390	244.720.496	1%	1.807.577	247.805.886	1%
30	Palbapang	29.619.193	497.406.128	6%	50.921.759	506.291.886	10%
31	Sumber Agung	107.187.307	772.079.314	14%	98.368.474	799.577.621	12%
32	Caturharjo	45.464.260	498.970.757	9%	53.733.668	517.235.017	10%
33	Gadingharjo	28.036.560	126.741.025	22%	30.515.629	154.777.585	20%
34	Canden	53.229.689	513.719.102	10%	66.060.108	535.125.291	12%
35	Srihardono	8.995.062	320.696.227	3%	8.003.230	293.305.157	3%

Lampiran 5. Daftar CCr pada BKM/LKM di Kabupaten Bantul

No	Nama Desa	2014		Hasil	2015		Hasil
		Total Pendapatan tunai	Total Biaya tunai		Total Pendapatan tunai	Total Biaya tunai	
1	Argosari	20.895.106	25.285.903	83%	31.501.292	25.327.447	124%
2	Argomulyo	369.701	25.911.217	1%	5.353.738	16.370.419	33%
3	Wonokromo	84.054.171	54.456.281	154%	100.175.297	59.602.660	168%
4	Pleret	74.520.255	43.874.012	170%	75.543.393	46.013.424	164%
5	Sabdodadi	60.470.610	15.947.068	379%	66.269.317	15.570.354	426%
6	Trimurti	130.659.437	127.925.713	102%	138.330.434	131.635.603	105%
7	Bawuran	22.073.391	6.864.160	322%	24.180.023	6.896.694	351%
8	Poncosari	64.057.930	42.434.732	151%	89.823.412	48.844.754	184%
9	Wonolelo	31.342.415	21.387.550	147%	37.736.258	27.429.500	138%
10	Banguntapan	22.775.019	40.089.347	57%	25.726.247	39.183.405	66%
11	Jambidan	127.672.507	39.380.734	324%	131.142.313	51.051.423	257%
12	Wijirejo	94.232.775	84.726.618	111%	99.071.875	103.075.220	96%
13	Ngestiharjo	90.310.521	85.173.435	106%	101.895.388	85.319.340	119%
14	Potorono	54.439.294	40.097.573	136%	66.565.967	44.087.458	151%
15	Srigading	36.532.337	27.988.894	131%	42.969.550	32.350.600	133%
16	Triharjo	41.335.739	29.157.283	142%	27.874.180	35.828.231	78%
17	Murtigading	113.538.670	56.533.979	201%	122.679.680	57.650.282	213%
18	Segoroyoso	78.825.856	14.052.012	561%	81.675.748	16.819.750	486%
19	Tirtonirmolo	90.336.367	62.256.160	145%	97.431.417	70.660.019	138%
20	Bangunjiwo	48.401.650	36.479.087	133%	57.720.493	33.980.734	170%
21	Panggunharjo	11.440.549	9.810.743	117%	15.310.575	11.136.160	137%
22	Argodadi	37.030.091	9.960.522	372%	47.074.943	9.880.884	476%
23	Sumbermulyo	74.011.693	50.466.472	147%	87.325.851	58.356.262	150%
24	Bantul	15.301.774	18.268.600	84%	13.335.029	21.466.300	62%
25	Panjangrejo	53.805.019	28.233.992	191%	68.462.515	30.528.736	224%
26	Patalan	47.224.484	18.566.222	254%	51.618.530	17.917.511	288%
27	Seloharjo	25.034.044	5.009.479	500%	32.281.074	15.011.536	215%
28	Bangunharjo	96.218.868	99.923.023	96%	99.728.937	104.119.384	96%
29	Gadingsari	3.085.390	6.398.213	48%	1.807.577	8.330.468	22%
30	Palbapang	29.619.193	26.577.528	111%	50.921.759	31.411.305	162%
31	Sumber Agung	107.187.307	62.947.248	170%	98.368.474	57.683.135	171%
32	Caturharjo	45.464.260	15.850.725	287%	53.733.668	16.022.416	335%
33	Gadingharjo	28.036.560	5.522.431	508%	30.515.629	5.090.032	600%
34	Canden	53.229.689	33.813.196	157%	66.060.108	36.046.716	183%
35	Srihardono	8.995.062	4.164.098	216%	8.003.230	4.491.749	178%

Lampiran 6. Data Statistik Program SPSS 20.0

1. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LAR_2014	35	,15	,60	,3708	,11917
LAR_2015	35	,10	,62	,3598	,14154
PAR_2014	35	,71	,86	,7710	,04068
PAR_2015	35	,71	,86	,7650	,03847
ROI_2014	35	,04	,59	,3280	,10606
ROI_2015	35	,09	,56	,3410	,09713
CCr_2014	35	,12	2,37	1,3170	,46691
CCr_2015	35	,47	2,45	1,3333	,44588
Valid N (listwise)	35				

2. Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
LAR_2014	,135	35	,107	,959	35	,209
LAR_2015	,168	35	,014	,948	35	,096
PAR_2014	,079	35	,200 [*]	,962	35	,258
PAR_2015	,127	35	,168	,941	35	,060
ROI_2014	,147	35	,055	,956	35	,175
ROI_2015	,146	35	,057	,952	35	,127
CCr_2014	,167	35	,014	,943	35	,069
CCr_2015	,165	35	,016	,954	35	,151

3. Hasil Uji Hhipotesis

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	LAR_2014 - LAR_2015	,01094	,06799	,01149	-,01242	,03430	,952	34	,348
Pair 1	PAR_2014 - PAR_2015	,00600	,03520	,00595	-,00609	,01809	1,008	34	,320
Pair 1	ROI_2014 - ROI_2015	-,01294	,03244	,00548	-,02408	-,00180	-2,360	34	,024
Pair 1	CCr_2014 - CCr_2015	-,01622	,20095	,03397	-,08525	,05280	-,478	34	,636

Lampiran 7. Surat Observasi Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

Nomor : 1353/UN34.18/I.T/2017

12 Juli 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Observasi

Yth. Asisten Kota Mandiri Program KOTAKU Kabupaten Bantul
Program KOTAKU
Jl. Gajah Mada No. 01 Bantul, Yogyakarta (Kompleks Kantor Pengelolaan Pasar Bantul)

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Muhammad Idris
NIM	: 15812147032
Jurusan/Prodi	: Akuntansi - S1
Judul	: Melakukan Observasi untuk pelaksanaan Skripsi dengan Judul Analisis Tingkat Kesehatan Unit Pengelola Keuangan Pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul
Tujuan	: Melakukan observasi untuk melengkapi tugas mata kuliah
Waktu Observasi	: Senin - Sabtu, 17 - 29 Juli 2017

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan bantuan seperlunya.

Atas ijin dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I



Prof. Sukirno, S.Pd., M.Si., Ph.D.
NIP. 196904141994031002

Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

Nomor : 1354/UN34.18/LT/2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Observasi

12 Juli 2017

Yth . **Konsultan Manajemen Wilayah 5 DIY Program KOTAKU**
Jl. H. Agus Salim No. 42 Rt:039 Rw:005 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta 55262

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Idris
NIM : 15812147032
Jurusan/Prodi : Akuntansi - S1
Judul : Melakukan Observasi untuk pelaksanaan Skripsi dengan Judul Analisis Tingkat Kesehatan Unit Pengelola Keuangan Pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul
Tujuan : Melakukan observasi untuk melengkapi tugas mata kuliah
Waktu Observasi : Senin - Sabtu, 17 - 29 Juli 2017

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan bantuan seperlunya.

Atas ijin dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I



Tembusan :
1. Su b. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Sukirno, S.Pd., M.Si., Ph.D.
NIP. 196904141994031002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

Nomor : 1352/UN34.18/LT/2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Observasi

12 Juli 2017

Yth . Koordinator Kota Program KOTAKU Kabupaten Bantul
Program KOTAKU
Jl. Tegalturi No. 41 Giwangan Umbulharjo Kota Yogyakarta

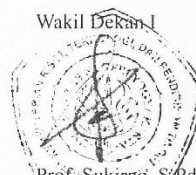
Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Idris
NIM : 15812147032
Jurusan/Prodi : Akuntansi - S1
Judul : Melakukan Observasi untuk pelaksanaan Skripsi dengan Judul Analisis Tingkat Kesehatan Unit Pengelola Keuangan Pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul
Tujuan : Melakukan observasi untuk melengkapi tugas mata kuliah
Waktu Observasi : Senin - Sabtu, 17 - 29 Juli 2017

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan bantuan seperlunya.

Atas ijin dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I



Prof. Sukirno, S.Pd., M.Si., Ph.D.
NIP. 196904141994031002

Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

Nomor : 2008/UN34.18/LT/2017
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : Ijin Penelitian

5 Oktober 2017

Yth. **Konsultan Manajemen Wilayah 5 DIY Program KOTAKU**
Jl. H. Agus Salim No. 42 Rt: 039 Rw: 005 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta 55262

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Idris
NIM : 15812147032
Program Studi : Akuntansi - S1
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kesehatan Unit Pengelola Keuangan Pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul.
Tujuan : Memohon ijin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi
Waktu Penelitian : Jumat - Kamis, 1 September - 30 Nopember 2017

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Wakil Dekan I
Prof. Sukirno, S.Pd., M.Si., Ph.D.
NIP. 196904141994031002

Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

Nomor : 2007/UN34.18/LT/2017
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : Ijin Penelitian

5 Oktober 2017

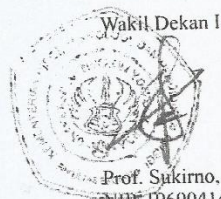
Yth. Asisten Kota Mandiri Program KOTAKU Kabupaten Bantul
Program KOTAKU
Jl. Gajah Mada No. 01 Bantul, Yogyakarta (Kompleks Kantor Pengelolaan Pasar Bantul)

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Idris
NIM : 15812147032
Program Studi : Akuntansi - S1
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kesehatan Unit Pengelola Keuangan Pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul.
Tujuan : Memohon ijin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi
Waktu Penelitian : Jumat - Kamis, 1 September - 30 Nopember 2017

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Wakil Dekan I
Prof. Sukirno, S.Pd., M.Si., Ph.D.
NIP. 196904141994031002

Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

5 Oktober 2017

Nomor : 2010/UN34.18/LT/2017

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : Ijin Penelitian

Yth . Koordinator Kota Program KOTAKU Kabupaten Bantul
Program KOTAKU
Jl. Tegalturi No. 41 Giwangan Umbulharjo Kota Yogyakarta

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Idris
NIM : 15812147032
Program Studi : Akuntansi - S1
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kesehatan Unit Pengelola Keuangan Pada Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemberhentian Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bantul.
Tujuan : Memohon ijin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi
Waktu Penelitian : Jumat - Kamis, 1 September - 30 Nopember 2017

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.